

UPAYA WALHI MENANGANI EFEK PEMANASAN GLOBAL DI
INDONESIA PASCA KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM PBB
2007

**WALHI Efforts in Handling Global Warming Effects in Indonesia After UN
Climate Change Conference 2007**

Skripsi



Disusun oleh :

Dewi Irawati
20040510201

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik

Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

2009

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA WALHI MENANGANI EFEK PEMANASAN GLOBAL DI INDONESIA
PASCA KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM PBB 2007

*(WALHI Efforts in Handling Global Warning Effects in Indonesia After UN
Climate Change Conference 2007)*



Disusun Oleh :

Nama : Dewi Irawati
Nomor Mahasiswa : 20040510201

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 2 Mei 2009
Tempat : Ruang HI. C

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua,

Drs. Husni Amriyanto P., M.Si

Penguji I

Penguji II

Dra. Mutia Hariati H., M.Si

Adde M. Wirasenjaya., S.IP

MOTTO

Orang yang berjiwa besar memiliki dua hati, satu hati menangis dan yang satu lagi bersabar (Khalil Gibran)

"Ketahuilah, hal-hal terindah di dunia ini terkadang tak bisa terlihat dalam pandangan atau teraba dengan sentuhan; mereka hanya bisa dirasakan dengan hati." (Helen Keller)

Kita tidak akan pernah memiliki seorang teman,
jika kita mengharapkan seseorang tanpa kesalahan.
Karena semua manusia itu baik kalau kita bisa melihat kebaikannya
dan menyenangkan kalau kita bisa melihat keunikannya,
tapi semua manusia itu akan buruk dan membosankan kalau kita tidak bisa
melihat keduanya. (Dewi Irawati)

Halaman Persembahan

Syukur Alhamdulillah yang tiada habisnya kuucapkan atas terselesaikan karya kecil ini yang ku persembahkan kepada:

UNTUK KEDUA ORANG TUAKU YANG TERCINTA

Bapak dan I bu

Setiap....

....Tetes Keringat

....Tetes Air Mata

....Tetes Doa

Yang selalu tercurah kepadaku....

Thank's to...

Alhamdulillah tiada henti diucapkan penulis ketika dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang cukup menjadi beban. Dibalik penyusunan skripsi ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tanpa bantuan, doa, serta semangat dari berbagai pihak. Oleh sebab itu saya ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada :

- ☞ Allah SWT, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, hanya untuk Allah rabb semesta alam. Engkaulah yang Maha Kuat tanamkan kekuatan dalam hatiku agar aku tidak menyerah pada kesulitan hidup dan mampu beristiqamah dalam keyakinanku. Amien..
- ☞ Ibu dan Bapak yang selalu mendukung dan memotivasi Dewi untuk terus berusaha dan pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Terima kasih untuk segala kesabaran, pengorbanan, waktu, doa dan semua hal indah lainnya yang telah dicurahkan untuk Dewi. Dad, I try hard to make it and I just want to make you proud, but I'm never gonna be enough for you...I'm sorry...I can't be Perfect..And Mom, I try not to think about the pain I feel inside but Did you know you uses to be my hero??....
- ☞ Untuk Mas Aang dan Mb' Astri terima kasih atas doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. Keponakan

kecilku, Raka, ayo cepatlah besar biar tante bisa bermain bersamamu...hehe... kalo masih kecil ga seru sich...

☞ Temen-temen sekampung ku yang telah memberi support dan memintaku untuk cepat wisuda. Thanks ya, guys... Terlalu banyak dari kalian bila disebutkan satu persatu. Hehe...

☞ Buat Plendz ForApple, Lina Lintong (Kapan nikahnya nich?? Kan masnya dah mapan...), Anggi Anggora (Cieeee...ciee...siap-siap jadi Bunda nich...), Fina Imoetz (Ayo cari kerja...jangan terlena ma cinta melulu donx...). Kalo kita bertemu lagi, Rumpizz lagi yukzz mengkhayal dengan imajinasi lebay seperti dulu...

☞ Buat temen-temen Travellingku. Mb' Yuli alias Adi sang navigator, Semoga tujuan hidupmu dapat kau wujudkan..Amien. Jenk Hengky, What's up Bro?!...Ayo semangat donx cari kerjanya...Mbah Rusli, ku harap kalo kita berjumpa lagi, badanmu tak kremenx dan kebal penyakit...Amien..

☞ For Trio Pillow : Rika, sorry I never think to hurt you, if I make any mistake to you, please...forgive me.. Mila and Dila..Hehe...Semangat!! Ganbatte !! Food hunting is never die!!

☞ Chynx q chynx ynx plnx q chynx hny kw terchynx...thx 4 everything. You never give up with your live. And I'm so sorry, I always hurt you but you always patience to take care of me... I

don't know about future but I always pray and hope to live together with you... I Love you although...

☞ JupeZ..Thanks bgt dah nemenin aku seliweran muter-muter Jogja. Truz Yakuza 69...terima kasih atas kesabaranmu menemaniku ngetik skripsi ini dari pagi mpe tengah malam...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhannahu Wa Ta'ala, atas izin dan ridhoNya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya WALHI Menangani Efek Pemanasan Global Di Indonesia Pasca Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007”**. Shalawat serta salam teruntuk Kholilullah, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan serta menyampaikan kepada kita semua ajaran rukun iman dan rukun Islam yang makin terus terbukti kebenarannya.

Skripsi ini disusun berawal dari ketertarikan penulis mengenai bagaimana peran serta dan apa yang dilakukan WALHI dalam upayanya menangani efek pemanasan global di Indonesia yang makin lama makin meresahkan masyarakat Indonesia Dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan serta perhatian dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan keikhlasan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Grace Lestariana W. Sip, M.Si selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional
2. Alm. Bapak Drs. Harwanto Dahlan, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, saran dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT. Dan diberi tempat yang lebih baik di sisi-Nya.
3. Bapak Drs. Husni Amriyanto P., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pengganti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dra. Mutia Hariati H., M.Si, selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu dalam memberikan masukan dalam proses revisi skripsi dengan sabar.
5. Bapak. Adde M. Wirasenjaya, Sip., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan petunjuk dan masukan dalam revisi skripsi ini..
6. Bapak Jumari di TU HI yang selalu setia tersenyum dan sabar dalam membantu para mahasiswa.
7. Seluruh dosen-dosen HI yang selama ini telah menjadi pengajar bagi kami para mahasiswa, seluruh staf TU Fisipol UMY, staf perpustakaan UMY, staf Lab HI

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa tiada suatu hasil karya manusia yang sempurna demikian pula dengan skripsi ini yang tentu tidak lepas dari banyak kekurangan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Mei 2009

Dewi Irawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
HALAMAN MOTTO	iii	
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv	
KATA PENGANTAR	vii	
DAFTAR ISI	ix	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Pokok Permasalahan	15
	C. Kerangka Dasar Pemikiran	15
	D. Hipotesa	20
	E. Metode Penelitian	21
	F. Jangkauan Penelitian	21
	G. Sistematika Penulisan	21
BAB II	DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA	23
	A. Perubahan Iklim	23
	B. Dampak Perubahan Iklim di Indonesia	25
	C. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)	31
	C.1. Sejarah Terbentuknya Walhi	31
	C.2. Profil Organisasi Walhi	39
	C.2.1. Kelembagaan Dalam Walhi	40
	C.2.2. Visi Dan Misi Walhi	41
	C.2.3. Pengambilan Keputusan Dalam Walhi	44
	C.2.4. Sumber Dana Walhi	45
	C.2.5. Walhi Dan Politik	46
	C.2.6. Menjadi Organisasi Publik	48
	C.3. Walhi dan Perubahan Iklim	49
	C.3.1. Save Our Borneo di Kalimantan	50
	C.3.2. Capacity Building in Asia and the Pacific on	

	Issues Related to Future Actions on Climate Change	51
	C.3.3. Jeda Tebang	54
	C.3.4. Pertemuan Friends of Earth International di Bogor	63
	C.3.5. Civil Society Forum for Climate Justice ...	65
BAB III	KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM PBB 2007	67
	A. Latar Belakang Konferensi	67
	A.1. Jalannya Konferensi	69
	A.2. Harapan Dan Tuntutan Non-Government Organization (NGO)	71
	A.3. Hasil Konferensi	73
	B. Indonesia Pasca Konferensi Perubahan Iklim	77
BAB IV	UPAYA WALHI MENANGANI PEMANASAN GLOBAL	80
	A. Kampanye Pelestarian Alam	80
	A.1. Dukung Donasi Selamatkan 11,4 Juta Hektar Hutan Indonesia	80
	A.2. Kampanye HELP Keadilan Iklim	82
	B. Aktif Terlibat Dalam Pertemuan Lingkungan Hidup Internasional	86
	B.1. Mengikuti Pertemuan FWI dengan tema 'Laju Dan Penyebab Deforestasi dan Degradasi hutan di Indonesia'	86
	B.2. Pertemuan Asia Pasifik Conference On Climate Change Di Bangkok	88
	B.3. Koalisi LSM Lingkungan Hidup Se-Asia Dalam Pertemuan WOC	91
BAB V	KESIMPULAN	95
	DAFTAR PUSTAKA	xi
	LAMPIRAN	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

Bara deforestasi di Indonesia kian meluas, penyebabnya adalah pembalakan liar. Juga konversi hutan untuk pembangunan kelapa sawit dan industri pulp dan paper. Dari pembalakan liar, sejak awal dekade ini, hutan Indonesia seluas 2,8 juta hektar per tahun hilang.

Setali tiga uang, konversi hutan dan industri pulp dan paper juga menjadi faktor penyebab meningkatnya laju deforestasi. Dari konversi hutan diketahui, 15,9 juta hektar hutan alam tropis dibabat. Konversi hutan yang ditujukan untuk pembangunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor peningkatan deforestasi di Indonesia. Sejak menjadi primadona, hutan seluas 15,9 juta hektar hutan alam tropis dibabat. Berbanding terbalik dengan luas lahan, konsesi yang telah ditanami justru tidak mengalami peningkatan berarti. Dari 3,17 juta ha pada tahun 2000, hanya mengalami peningkatan menjadi 5.5 jt ha pada tahun 2004. Lebih dari 10 juta hektar hutan ditinggalkan begitu saja setelah tanam tumbuh di atasnya “dipanen”.¹

Tak jauh berbeda, persoalan lain muncul dari industri pulp dan paper. Industri ini membutuhkan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu setiap tahunnya (Departemen Kehutanan, 2006). Dengan kondisi Hutan Tanaman Industri untuk pulp yang hanya mampu menyuplai 29,9 persen dari total kebutuhannya, industri ini akan meneruskan aktivitas pembalakan di atas hutan alam dengan kebutuhan

¹ http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/070528_htn_indo_cu/ di akses pada tanggal 01/11/08

per tahun mencapai 21,8 juta meter kubik. Kayu ini diperoleh dari hutan alam milik afiliasinya maupun dari konsesi mitranya. Belum termasuk plywood dan industri pertukangan lainnya yang kemampuan HTInya hanya mampu menyuplai 25 persen.²

A. Latar Belakang Masalah

Deskripsi di atas bertutur tentang dampak negatif kejahatan kehutanan di Indonesia. Jika dikalkuasi, akibat kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, konversi hutan alam, dan sebagainya, Indonesia menderita kerugian ekonomis yang sangat besar. Kerugian ini tak mencakup bencana ekologis yang ditimbulkan oleh kegiatan pembalakan liar, seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi diberbagai sudut Nusantara.

Ketimpangan proses peradilan disebabkan oleh virus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terkait dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum, bahkan pejabat birokrasi, di seluruh jenjang peradilan, mulai polisi, jaksa, hingga hakim. Sehingga operasi anti pembalakan liar gagal dalam menjerat para cukong kelas kakap dan para pelindungnya di kepolisian dan militer.

Pola perspektif hidup dan tata nilai yang dipijak oleh masyarakat, Perhutani, pemerintah baik lokal maupun pusat menjadi faktor pokok kian derasnya laju kejahatan kehutanan. Dalam perspektif masyarakat, hutan memiliki fungsi melindungi pemukiman mereka dari angin ribut, kekeringan, dan erosi. Seperti halnya Perhutani yang meyakini fungsi ekologis hutan. Uniknya,

² http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/070528_htn_indo_cu/ di akses pada tanggal 01/11/08

perambahan dan pembalakan liar terus terjadi seiring kalkulasi ekonomis yang dianut Perhutani. Tak jauh berbeda, pemerintah pun bertolak dari aspek ekonomis hutan ketimbang fungsi ekologisnya. Bagi pemerintah, hutan adalah sumber daya yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah-ruah. Karenanya, amat diperlukan bagi pemerolehan pendapatan nasional. Namun, kebijakan pembangunan yang dijalankan tak berpihak pada keberlanjutan hutan.

Laju kejahatan kehutanan seperti pembalakan liar, konversi hutan tanpa tanam kembali, dan dahaga tanpa batas industri pulp dan paper, mengharuskan pemerintah untuk menghentikan berbagai bentuk kejahatan kehutanan yang berpotensi memunculkan deretan bencana ekologis, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Di samping itu, keterlibatan masyarakat (terlebih masyarakat adat) dalam menjaga kelestarian hutan amat diperlukan. Tak hanya sebatas itu, keseriusan segenap aparat penegak hukum menjadi kata kunci penyelesaian arus deforestasi akibat kejahatan kehutanan. Tanpa keseriusan dan keterlibatan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan, bukan mustahil hutan Indonesia lekas gundul dalam jangka waktu yang tak panjang.

Akhirnya, deforestasi sebagai akibat illegal logging setidaknya disebabkan oleh tidak adanya pengakuan pemerintah terhadap hak rakyat, maraknya korupsi di sektor pengelolaan sumber daya hutan dan lebarnya jarak antara penawaran dan permintaan. Jika ketiga hal ini tak segera diatasi, maka hutan Indonesia akan gundul dalam jangka waktu yang tak panjang, dan berakibat pada kemiskinan yang akan bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas penderitaan kaum miskin.

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2007 juga telah menjadi pemicu meningkatnya pemanasan global di peringkat ketiga.³ Hilangnya sebagian hutan berarti meningkatnya pelepasan emisi ke udara dan membuat suhu pemanasan global meninggi.

Ekspansi dan peningkatan produksi industri kehutanan telah melebihi kemampuan perkebunan-perkebunan yang sangat besar untuk memasok bahan baku dan telah mendorong perluasan perkebunan lebih jauh menembus hutan alam. Pada tahun 2000-2004, angka kerusakan meningkat. Badan Planologi Departemen Kehutanan memperkirakan angka 3,4 juta hektar hutan rusak setiap tahunnya. Pada tahun 2005 dan 2006 . Angka kerusakan turun kembali menjadi 2,7 – 2,8 juta hektar per tahun. Faktor penyebabnya bukan lagi semata penebangan legal dan ilegal untuk pemenuhan industri, namun pembukaan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2003, industri kehutanan mengalami defisit sampai dengan 63 persen. Pada tahun 2006, hutan alam dan HTI ditambah kayu tebangan dari perluasan perkebunan hanya mampu memenuhi 48,62 persen dari kebutuhan. Sisanya, sebesar 51 persen dipenuhi dari tebangan ilegal.⁴ Bila masalah celah (*gap*) yang cukup besar ini tidak diperbaiki dari sekarang, diperkirakan pada tahun 2020 hutan alam indonesia kecuali di hutan lindung dan kawasan konservasi akan musnah. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap sejumlah industri yang ada di Indonesia. Sepuluh tahun dari sekarang sekitar dua pertiga industri kehutanan akan gulung tikar dan sekitar 1,982 juta kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh akan kehilangan pekerjaan.

³ <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2999354,00.html> diakses pada tanggal 25/11/08

⁴ http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/070528_htn_indo_cu/ di akses pada tanggal 01/11/08

Dalam masalah kerusakan hutan ini, WALHI mengusulkan adanya program Jeda Tebang kepada Pemerintah. Secara definisi Jeda Tebang adalah berhenti sejenak dari aktivitas penebangan dan konversi hutan. Tujuannya adalah untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen. Program Jeda Tebang dapat dilaksanakan minimal selama 15 tahun. Jeda Tebang memiliki lima tahapan dan dilaksanakan selama tiga tahun pertahapan. Langkah-langkah Jeda Tebang dapat dilakukan selama tiga tahun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁵ Tahap pertama, penghentian pengeluaran ijin-ijin baru. Penghentian pemberian atau perpanjangan ijin-ijin baru HPH, IPK, perkebunan, serta mengeluarkan kebijakan impor bagi industri olah kayu. Jeda perizinan adalah syarat mutlak dan menjadi bagian sekaligus tahap pertama pelaksanaan Jeda Tebang di Indonesia. Tahap kedua, pelaksanaan uji menyeluruh kinerja industri kehutanan. Pada tahap ini dalam waktu 2 bulan setelah Jeda Tebang, penilaian asset industri-industri bermasalah harus dilaksanakan melalui due diligence secara independen oleh pihak ketiga. Sehingga pada tahap ini pemerintah dapat mengimplementasikan komitmen penutupan industri sarat utang dan komitmen rekalkulasi nilai sumber daya hutan. Tahap ketiga, penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam. Dalam waktu 6 bulan, pemerintah harus menghentikan seluruh penebangan kayu di Sumatera dan Sulawesi, kedua pulau ini hutannya sangat terancam. Pada tahap ketiga ini, pemerintah dapat melaksanakan komitmen restrukturisasi industri olah kayu, komitmen pengaitan program reforestasi dengan kapasitas industri, komitmen

⁵ *Jeda Tebang Sekarang, Usulan Proses Pelaksanaan Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Penyelamatan Hutan Tropis Tersisa*, http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070528_jdtbgskrng_li/ diakses pada tgl 08/09/07

desentralisasi urusan kehutanan, dan komitmen penghentian penebangan hutan secara liar

Tahap keempat, penghentian sementara seluruh penebangan hutan dan penyelesaian masalah-masalah potensi sosial. Dalam waktu satu tahun jeda tebang dilaksanakan, pemerintah dapat menghentikan seluruh kegiatan penebangan kayu di Kalimantan dan penanganan masalah sosial yang muncul sejauh ini dan selama masa Jeda Tebang dilaksanakan melalui sebuah kebijakan nasional. Sedangkan untuk daerah perlu disiapkan Protokol Resolusi Konflik dan Standar Pelayanan Ekologi menjadi wacana yang berkembang luas. Pada tahap ini, langkah-langkah reformasi dapat dilaksanakan dengan melaksanakan komitmen memperbaiki sistem pengelolaan hutan serta komitmen penyusunan program kehutanan nasional. Tahap lima, larangan sementara penebangan hutan di seluruh Indonesia. Dalam waktu 2-3 tahun, penghentian seluruh penebangan kayu di hutan alam untuk jangka waktu yang ditentukan di seluruh Indonesia. Pada masa ini, penebangan kayu hanya diizinkan di hutan-hutan tanaman atau hutan yang dikelola berbasis masyarakat lokal. Pada tahap ini, pemerintah dapat menjalankan komitmen penanggulangan kebakaran hutan dan komitmen melakukan inventarisasi sumber daya hutan.

Namun usulan jeda tebang ini belum terlaksana karena dianggap merugikan perekonomian Indonesia dan mengakibatkan keterpurukan beberapa industri (Industri pulp dan kertas) di Indonesia atas kurangnya pasokan bahan baku.

Bila kerusakan hutan tidak segera diperbaiki secepat mungkin maka apa yang dikatakan para ahli dari *International Panel on Climate Change (IPCC)* bahwa Pemanasan global berdampak serius pada kehidupan ratusan juta warga di bumi. Dampaknya, seperti laporan 441 pakar Intergovernmental Panel on Climate Change (*IPCC*), 10 April 2007, naiknya suhu permukaan bumi lima tahun mendatang plus dampak lanjutan berupa kegagalan panen, kelangkaan air, lenyapnya spesies, banjir, dan kekeringan. Asia terkena dampak paling parah: produksi pertanian Cina dan Bangladesh anjlok 30 persen, India langka air, dan 100 juta rumah warga pesisir tergenang.⁶

Peningkatan temperature suhu mencairkan es di kutub, seperti halnya Greenland sehingga memperbanyak volume air di laut. Tinggi muka laut diseluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20. Apabila separuh es di Greenland dan Antartika meleleh maka terjadi kenaikan permukaan air laut di dunia rata-rata 6-7 meter. Tinggi kenaikan rata-rata permukaan air laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi.⁷

Belum lagi kerusakan yang terjadi pada hutan bakau yang di konversi sebagai lahan pertambakan juga menjadi permasalahan di kawasan daerah pesisir. Pertambahan luas areal lahan bakau yang dikonversi menjadi tambak skala besar mencapai 14% pertahun. Perambahan hutan bakau oleh ekspansi industri pertambakan skala besar ini cukup mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini dipicu oleh kerusakan tata ekosistem hutan bakau yang berdampak pada timbulnya konflik sosial, menurunnya kualitas hidup masyarakat, juga kualitas perairan dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, Penebarplus+, Jakarta, 2007, hal. 26

lahan masyarakat sekitar tambak, akibat aktivitas industri pertambakan. Berkurangnya hutan bakau dapat mempercepat abrasi di daerah pesisir. Selain itu hutan bakau bermanfaat dalam meredam ombak saat pasang.

Merujuk pada data dari Departemen Kelautan dan Perikanan (2005) tentang perkembangan industri pertambakan, dapat disebut, “Negara menderita kerugian sebesar US\$ 28 miliar per tahun akibat hancurnya hutan bakau . Nominal kerugian ini akan terus bertambah, jika pemerintah Indonesia tidak memberlakukan jeda ekspansi industri pertambakan dan melakukan upaya rehabilitasi terhadap kerusakan hutan bakau,” tukas Riza Damanik, Manajer Kampanye Pesisir dan Kelautan WALHI.⁸

Apabila para peneliti dan ilmuwan mengungkapkan secara gamblang tentang pemanasan global maka kita akan mengetahui betapa dasyatnya efek pemanasan global dalam jangka panjang. Mungkin Indonesia akan kehilangan beberapa pulau atau bahkan kemungkinan Indonesia tenggelam. Dengan naiknya permukaan air laut karena dampak pemanasan global maka satu per satu pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam. Dari hasil pendataan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), selama dua tahun (2005-2007) terakhir ada 24 pulau yang tenggelam karena penggalian pasir, erosi dan perubahan alam. Rinciannya sebagai berikut. Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, dan Papua masing-masing kehilangan tiga pulau. Lima pulau tenggelam di Kepulauan Riau. Sumatera Barat kehilangan dua pulau dan Sulawesi Selatan kehilangan satu pulau. Kepulauan Seribu yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

⁸ <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2999354,00.html> diakses pada tanggal 25/11/08

kehilangan tujuh pulau. Diperkirakan sekitar 2.000 pulau akan tenggelam pada tahun 2030-2050 karena pemanasan global.⁹

Lebih dari dua pertiga kota-kota di dunia akan terkena dampak pemanasan global. salah satunya Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia yang sebagian besar berada di dekat laut. Jakarta adalah kota yang 70% wilayahnya berada di kawasan pantai yang berelevansi rendah yang terancam oleh naiknya permukaan laut akibat pemanasan global. Negara-negara lain yang terancam selain Indonesia adalah Jepang, Cina, Bangladesh, Vietnam, dan Amerika Serikat.¹⁰

Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dinilai masih sangat rendah. Dilihat dari segi pendidikan, dimana sebagian masyarakat masih minim pengetahuan tentang lingkungan. Contoh kecil yang sering kita lihat adalah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan meski telah disediakan tempat sampah. Pendidikan mengenal lingkungan perlu dilakukan pada usia sedini mungkin, sehingga dapat memupuk kecintaan akan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini telah memperburuk kondisi alam dan memicu perubahan iklim. Kemajuan teknologi juga perlu memerhatikan lingkungan. Sampai sekarang ini pengguna kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus meningkat belum lagi dengan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri. Peningkatan emisi yang terjadi dari aktivitas kehidupan masyarakat dunia dalam memenuhi kelangsungan hidup perlu dibatasi.

⁹ Suara Pembaharuan, 17 Juni 2007

¹⁰ Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, Penebarplus+, Jakarta, 2007, hal. 38

Upaya WALHI dalam berperan aktif di lingkungan internasional adalah dengan menjadi anggota Friends of Earth International (FoE International). FoE International ini memiliki anggota dari organisasi-organisasi lingkungan hidup dari Negara-negara di dunia. FoE International menganggap bahwa perubahan iklim sangat mengkhawatirkan kondisi bumi, dan perlu adanya upaya-upaya yang serius dalam mengatasinya.

Eksekutif Daerah WALHI di Kalimantan pada tahun 2005, yaitu Berry Nahdian Forqon (Kalimantan Selatan), Yohanes (Kalimantan Barat), Syarifuddin (Kalimantan Timur) dan Nordin (Kalimantan Tengah) mendirikan Save Our Borneo (SOB) yang disahkan dengan akte notaris Ellys Nathalia, SH dengan akta nomor 24 tanggal 29 Maret 2006.¹¹ Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan semuanya, SOB yang semula adalah merupakan program internkoneksi antar WALHi se-Kalimantan di kukuhkan sebagai lembaga pada bulan Maret tahun 2006 yang berkedudukan di Palangkaraya.

SOB di bentuk dengan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan Kalimantan dilaksanakan secara adil dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang menghormati Hak Azasi Manusia, nilai-nilai kearifan masyarakat adat dan budaya lokal serta memperhatikan hak rakyat atas keberlanjutan kehidupan antar generasi.

Lalu pada tanggal 21-22 Agustus 2006, FoE International menghadiri seminar Kapasitas Pembangunan di Asia-Pacific dalam issue tentang tindakan-tindakan masa depan berkaitan perubahan iklim (Capacity Building in Asia and

¹¹ http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/hutan/080210_save_our_borneo_und/, diakses pada tgl 27/10/08

the Pacific on Issues Related to Future Actions on Climate Change).¹² Proyek ini adalah suatu prakarsa untuk memudahkan intra-regional bertukar pendapat tindakan apa bisa diterima perubahan iklim antar negara-negara Asia-Pacific, terutama antara negara berkembang. Yang akhirnya, juga mengizinkan negara-negara Asia-Pacific untuk berunding bila ada negosiasi internasional formal. Peneliti dari berbagai negara-negara dilibatkan didalam proyek yang akan berbagi studi dari negara-negara masing-masing. Negara-negara tersebut adalah Banglades, China, India, Indonesia, Jepang, Thailand.

Anggota-anggota federasi Friends of the Earth International yang berkumpul di Bogor, tanggal 23-25 April 2007 menyimpulkan bahwa perubahan iklim adalah alarm terakhir dari gagalnya model pembangunan yang berlaku sekarang. FOE meminta agar kompensasi yang diberikan atas emisi gas rumah kaca pada negara berkembang bukan dalam bentuk sumbangan, tetapi lebih pada pemenuhan kewajiban negara maju sesuai dengan ketentuan Protokol Kyoto karena mereka telah menghasilkan gas rumah kaca yang banyak. Selain itu, desakan agar emisi rumah kaca segera dikurangi juga kuat. Pertemuan ini merupakan persiapan masyarakat sipil terhadap putaran perundingan negara-negara penandatanganan Protokol Kyoto-UNFCCC di Bali Desember 2007.¹³

WALHI juga mendirikan Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Keadilan Iklim (Civil Society Forum for Climate Justice) terbentuk atas konsensus yang disepakati pada 21 Mei 2007 dalam rangka acara COP 13/CMP 3.

¹² <http://www.walhi.or.id/kampanye/future-actions-on-climate-change/stos/>, diakses pada tgl 22 Oktober 2008

¹³ *Friends of the Earth Minta Indonesia Pelopori Penurunan Emisi di Negara Maju*, http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/070425_foe_emisi_cu/ diakses tanggal 22 Februari 2008

CSF untuk Inisiatif Keadilan Iklim adalah batu loncatan yang strategis untuk aksi nyata untuk solusi permanen dari penderitaan yang masih dan selalu berlangsung dan membebani tingkat populasi yang sangat tinggi di Indonesia. Forum ini akan mengakomodir setiap ketertarikan dari CSO dan Organisasi Masyarakat (PO), terutama bagi mereka yang mewakili suara dari komunitas rentan untuk proses politis dalam rapat UNFCCC. Gerakan strategis telah dimulai untuk menekan Pemerintah Indonesia agar lebih relevan dengan keadaan realitas dari komunitas yang rentan dan paling terkena dampak.¹⁴

International Panel on Climate Change (IPCC) adalah sebuah kelompok peneliti khusus yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawasi sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global. Setiap beberapa tahun sekali, ribuan ahli dan peneliti-peneliti terbaik dunia tergabung dalam IPCC mengadakan penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan pemanasan global, dan membuat kesimpulan dari laporan dan penemuan-penemuan baru yang berhasil dikumpulkan, kemudian membuat persetujuan untuk solusi dari masalah tersebut.¹⁵

Pemanasan Global adalah issue global yang sangat serius ditanggapi negara-negara diseluruh dunia. Lalu pada tanggal 3-15 Desember 2007 diadakan Konferensi perubahan iklim oleh PBB di Bali, Indonesia. Konferensi ini digelar sebagai upaya lanjutan untuk menemukan solusi pengurangan efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan merupakan kelanjutan dari

¹⁴ *Wiki-CSF for Climate Justice:Perihal*, http://wiki.csoforum.net/index.php?title=Wiki-CSF_for_Climate_Justice diakses tanggal 19 Juli 2007

¹⁵ *Pemanasan Global*, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global diakses tanggal 15 Februari 2008

Protokol Kyoto yang akan selesai pada tahun 2012 nanti. Selain itu, pembicaraan juga membahas mengenai cara membantu negara-negara miskin dalam mengatasi pemanasan dunia.

Dalam diskusi konferensi, ada dua pihak yang menentukan yakni penghasil emisi dan penyerap emisi. Pemanasan yang sedang ditengahi adalah memberi nilai pada karbon. Selama ini pembangkit listrik tenaga batu bara dinilai lebih murah dibanding pembangkit listrik tenaga geothermal, karena karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batubara tidak dihitung sebagai biaya yang harus ditanggung.¹⁶

Sementara untuk para pemilik lahan (hutan) yang menjadi penyerap karbon akibatnya harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lahannya. Maka diperlukan pendapatan bagi pemilik lahan untuk memelihara lahannya. Pemilik lahan biasanya negara-negara berkembang, sedangkan penghasil karbon adalah negara-negara industri maju. Jadi negara-negara berkembang bisa memelihara hutannya dengan kompensasi dari negara-negara maju, sehingga semua pihak bertanggung jawab untuk pengelolaan karbon di bumi.

Perubahan iklim tidak mengenal batas negara namun distribusi dan dampaknya tidak seimbang dan adil, dimana sebagian besar rata-rata warga negara Amerika menghasilkan 6 ton karbon per tahun dan rata-rata seorang warga Eropa menghasilkan hampir 3 ton karbon pertahun, sedangkan di negara

¹⁶ *Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007*, http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Perubahan_Iklim_PBB_2007 di download tanggal 28 Januari 2008.

berkembang lainnya masih dalam kondisi miskin.¹⁷ Pada tahun-tahun terakhir (2007), bencana iklim telah mengambil nyawa lebih dari 3 juta orang dunia, 800 juta korban dan kerusakan-kerusakan langsung yang melebihi 23 miliar dolar, dan dari semua kerusakan-kerusakan itu 90% terjadi di negara-negara berkembang. Setiap warga negara memiliki hak atas kehidupan dan pembangunan.

B. POKOK PERMASALAHAN

Adapun pokok permasalahan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: “Bagaimana upaya WALHI menangani pemanasan global di Indonesia pasca Konferensi Perubahan Iklim PBB 3-15 Desember 2007?”

C. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas maka penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut dengan bertumpu pada kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh Harold dan Margaret Sprouts tentang lingkungan yaitu “*Man-Milieu Relationship*”¹⁸.

Menurut Harold dan Margaret Sprouts bahwa masyarakat politik memiliki basis geografis untuk menerangkan tingkah laku politik. Masing-masing masyarakat politik terletak pada suatu wilayah yang merupakan kombinasi unik dalam hal lokasi, ukuran, bentuk, iklim, dan sumber-sumber alamnya. Harold dan Margaret Sprouts juga mengungkapkan bahwa sebagian terbesar aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber *human* dan *non*

¹⁷ *Keadilan Iklim versus Penjajahan Baru*, http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/080225_keadilan_iklim_cu/ diakses tanggal 28 Januari 2008.

¹⁸ James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraf, Jr, *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey*, Third Edition, Harper Collins Publisher, New York, 1990

human. Faktor-faktor lingkungan yang *human* dan *non human* mempengaruhi kegiatan manusia hanya dalam dua segi. Pertama, faktor-faktor itu bisa mempengaruhi keputusan-keputusan manusia hanya jika manusia memperhatikannya. Kedua, faktor-faktor itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan berdasarkan persepsi-persepsi tentang lingkungan.

Dari pernyataan suami istri Harold dan Margaret Sprouts dapat digunakan untuk menganalisa pokok permasalahan diatas. Perubahan iklim yang ekstrem melahirkan pemanasan global yang dipicu oleh kegiatan manusia yang kelewat batas dalam memenuhi kebutuhan mereka. Perubahan iklim ini merupakan salah satu faktor lingkungan (*non human*) yang mempengaruhi aktivitas masyarakat politik baik individual, kelompok atau masyarakat dalam menentukan keputusan-keputusannya.

Untuk mengelola lingkungannya berdasarkan kondisi geografis dan melihat kondisi yang makin rapuh ini. WALHI sebagai kelompok yang peduli akan lingkungan berkeinginan untuk memulihkan keadaan lingkungan yang semakin tidak stabil. Dengan keadaan lingkungan tersebut membuat WALHI mengambil keputusan untuk lebih berupaya menangani pemanasan global dengan adanya Konferensi Perubahan Iklim PBB yang telah diselenggarakan pada tanggal 3-15 Desember 2007 di Bali, guna menangani masalah lingkungan di Indonesia, baik bencana alam, gelombang panas, badai, deforestasi dan kemiskinan yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrem.

Upaya WALHI menangani pemanasan global dengan berpartisipasi dalam Konferensi Perubahan Iklim melalui *Friends of the Earth International (FoEI)* telah mencerminkan sikap politisnya sebagai masyarakat politik dan menunjukkan kepada masyarakat politik dunia lainnya untuk berusaha menyelesaikan masalah lingkungan ini melalui pendekatan multilateral yang dipandang lebih baik daripada pendekatan unilateral. Karena masalah lingkungan ini adalah masalah global yang harus ditangani bersama. Farah Sofa (*Friends of the Earth Indonesia (Walhi) On Behalf of Walhi National Executive Office*) dan organisasi non pemerintah yang lain telah memberikan pernyataan pada pertemuan Internasional Informal Menteri-menteri untuk Perubahan Iklim, di Bogor, Indonesia 24-26 Oktober 2007 yang mana menyampaikan perhatiannya atas masalah perubahan iklim dan meminta para wakil Indonesia untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan tentang solusi masalah lingkungan di Konferensi Perubahan Iklim PBB.¹⁹ Merujuk pada faktor lingkungan yang *human* dan *non human* itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan individu berdasarkan persepsi-persepsinya tentang lingkungan. Dalam memenuhi setiap kebutuhannya, manusia tidak akan lepas dari lingkungannya. Lingkungan akan selalu menjadi faktor pendukung bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadikan manusia lupa bagaimana memanfaatkan potensial sumber alam yang ada. Konsumsi berlebih terhadap energi fosil seperti minyak bumi, batu bara yang tidak didukung oleh kemampuan rosot (sink) untuk menyerap gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrousosida

¹⁹ http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/070724_prbhn_iklim_cu/ diakses pada tanggal 12 Oktober 2008

(N₂O) dan lainnya mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca meningkat. Sehingga suhu permukaan bumi pun juga meningkat dan membawa berbagai konsekuensi antara lain meningkatnya air laut dan terjadinya gangguan pola cuaca. Dengan kata lain, naiknya suhu permukaan bumi yang sering disebut dengan pemanasan global ini membawa dampak perubahan iklim yang sangat ekstrem. Perubahan alam yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengelola lingkungannya membawa dampak yang begitu merugikan bagi manusia itu sendiri.

Belum lagi permasalahan lingkungan internal seperti halnya deforestasi hutan Indonesia yang makin lama makin parah dan memicu pemanasan global semakin meningkat, selain itu masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan hutan sebagai lahan ekonomi tanpa peduli akan fungsi hutan sebagai pelindung bumi. Meskipun dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya, haruslah ada batasan-batasan dalam aktivitasnya mengelola lingkungan. Teknologi juga berperan dalam aktivitas manusia memenuhi kebutuhannya.

Sprouts menekankan bahwa teknologi dan perubahan sosial memainkan peranan penting dalam hubungan manusia dengan lingkungannya.²⁰ Semakin majunya teknologi membuat manusia dalam mengelola lingkungannya tidak mengindahkan batasan yang harus mereka ikuti. Akibatnya bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat politik dunia saat ini. Yang paling merasakan dampaknya yaitu negara sedang berkembang (*Developing Countries*). Dalam hal ini penulis menunjuk Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang yang ikut merasakan dampak buruk dari perubahan iklim yang non human yaitu pemanasan global. Menurut Sprouts sangatlah bertentangan dengan realitas kondisi lingkungan sekarang ini. Limitasi dalam pemanfaatan kemajuan teknologi yang diungkapkan Sprouts malah tidak diterapkan. Kemajuan teknologi justru dimanfaatkan oleh sebagian besar negara maju untuk melakukan aktivitas kegiatan industrinya hingga kelewat batas dan sumber daya alam menjadi terkikis besar-besaran.

²⁰ James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraf, Jr, *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey*, Third Edition, Harper Collins Publisher, New York, 1990, Hal : 69

Oleh karena itu sebagian besar dari masyarakat politik dunia yang sadar akan pentingnya eksistensi sebuah lingkungan membuat sebuah perjanjian lingkungan internasional yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto. Lalu pada tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali telah diselenggarakan Konferensi Perubahan Iklim PBB sebagai pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan persiapan negara-negara di dunia dalam mengurangi efek gas rumah kaca setelah Protokol Kyoto kadaluwarsa pada tahun 2012.²¹ Dalam konferensi ini diikuti oleh sekitar sembilan ribu peserta dari 186 negara. Selain itu ada sekitar tiga ratus LSM internasional yang terlibat dan WALHI ikut serta di dalamnya.

Dalam diskusi konferensi, ada dua pihak yang menentukan yakni penghasil emisi dan penyerap emisi. Permasalahan yang sedang ditengahi adalah memberi nilai pada karbon. Selama ini pembangkit listrik tenaga batu bara dinilai lebih murah dibanding pembangkit listrik tenaga geothermal, karena karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara tidak dihitung sebagai biaya yang harus ditanggung. Sementara untuk para pemilik lahan (hutan) yang menjadi penyerap karbon akibatnya harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lahannya. Maka diperlukan pendapatan bagi pemilik lahan untuk memelihara lahannya. Pemilik lahan biasanya negara-negara berkembang, sedangkan penghasil karbon adalah negara-negara industri maju. Jadi negara-negara berkembang bisa memelihara hutannya dengan kompensasi dari negara-negara maju, sehingga semua pihak bertanggung jawab untuk pengelolaan karbon di bumi.

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_PBB_untuk_Perubahan_Iklim diakses pada tanggal 01 November 2008

Hasil dari Konferensi Perubahan Iklim ini merupakan suatu bentuk limitasi bagi manusia dalam bertindak terhadap lingkungannya. Bisa jadi pihak yang tidak sepakat dengan perjanjian ini menganggap bahwa solusi itu sangat membatasi ruang gerak pihak-dalam bertindak atau mengeluarkan kebijakannya. WALHI merasa senang dengan adanya masyarakat politik yang sadar untuk bertindak dalam mengatasi pemanasan global. Konferensi Perubahan Iklim membuat WALHI lebih bersemangat lagi dalam mengatasi masalah lingkungan sebagai dampak perubahan iklim ekstrem.

D. HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka dasar pemikiran di atas, maka Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim yang merupakan langkah menuju Konferensi Perubahan Iklim berikutnya, antara lain dengan mengkampanyekan pelestarian alam dan aktif terlibat dalam pertemuan lingkungan hidup Internasional.

E. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka (*library researh*). Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah dan surat kabar. Sedangkan data-data lain diperoleh dari media elektronik yaitu internet yang relevan dengan analisa diatas. Meskipun menganalisa data sekunder, penulis yakin bahwa penelitian ini tidak mengurangi kebenaran ilmiahnya.

F. JANGKAUAN PENULISAN

Untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh data bahan analisa maka penulisan ini memerlukan batasan. Penulisan ini akan membatasi pada kebijakan WALHI setelah diselenggarakan Konferensi Perubahan Iklim pada tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali dan lebih lanjut akan berfokus pada bagaimana upaya WALHI dalam menanggulangi pemanasan global.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dari penulisan ini ditulis dalam lima bab dengan sub topik pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia

Bab ini menjelaskan tentang dampak perubahan iklim yang akan terjadi di Indonesia dan usaha WALHI

BAB III Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan sekilas tentang Konferensi Perubahan Iklim di Bali dan Indonesia setelah Konferensi Perubahan iklim PBB 2007.

BAB IV Upaya WALHI Menangani Pemanasan Global

Penulis akan menjabarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh WALHI setelah adanya Konferensi Perubahan Iklim PBB dalam mengurangi dampak dari pemanasan global

BAB V Kesimpulan

Merupakan kesimpulan yang akan penulis sampaikan mengenai hasil dari penelitian. Dan kemudian sekiranya dapat penulis berikan guna dapat mengurangi dampak pemanasan global yang terjadi sekarang ini.

BAB II

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Lebih dari dua pertiga kota-kota di dunia akan terkena dampak pemanasan global. salah satunya Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia yang sebagian besar berada di dekat laut. Jakarta adalah kota yang 70% wilayahnya berada di kawasan pantai yang berelevansi rendah yang terancam oleh naiknya permukaan laut akibat pemanasan global. Negara-negara lain yang terancam selain Indonesia adalah Jepang, Cina, Bangladesh, Vietnam, dan Amerika Serikat.²²

Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dinilai masih sangat rendah. Contoh kecil yang sering kita lihat adalah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan meski telah disediakan tempat sampah. Pendidikan mengenal lingkungan perlu dilakukan pada usia sedini mungkin, sehingga dapat memupuk kecintaan akan lingkungan hidup.

A. Perubahan Iklim

Perubahan iklim tidak terjadi seketika, tetapi berangsur-angsur. Namun demikian, dampaknya sudah mulai kita rasakan saat ini. Menurut Pakar Iklim dari Institute Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. D. Murdiyarso, perubahan iklim adalah perubahan unsure-unsur iklim dalam jangka waktu panjang (50-100 tahun) yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca

²² Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, Penebarplus+, Jakarta, 2007, hal. 38

(GRK).²³ GRK paling penting dalam menangkap panas di dalam atmosfer adalah uap air dan karbon dioksida (CO₂).

Perubahan Iklim ini merupakan akibat dari pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena menipisnya lapisan ozon yang terdapat di atmosfer. Lapisan ozon inilah yang berfungsi sebagai pelindung bumi terhadap pengaruh sinar matahari. Bila lapisan ozon itu menipis maka suhu udara di bumi mengalami peningkatan. Peningkatannya rata-rata 0,6°C, bahkan suhu tersebut bisa lebih tinggi hingga 1,4-5,8°C, sehingga menyebabkan es di kutub mencair. Akhirnya, permukaan air laut naik dan merendam sebagian permukaan bumi.

Dengan adanya perubahan iklim, gelombang panas menjadi sangat sering terjadi dan semakin kuat. Tahun 2007 adalah tahun pemecahan rekor baru untuk suhu yang dicapai oleh gelombang panas yang biasa melanda Amerika Serikat. Daerah St. George, Utah memegang rekor tertinggi dengan suhu mencapai 48°C. Disusul oleh Las Vegas dan Nevada yang mencapai suhu 47°C.²⁴

Pada tahun 2003, daerah Eropa Selatan juga mendapat serangan gelombang panas hebat yang mengakibatkan tidak kurang dari 35.000 orang meninggal dunia dengan korban terbanyak dari Perancis (14.802 jiwa). gelombang panas ini kemudian menyebar mulai Inggris, Italia, Portugal, Spanyol, dan Negara-negara Eropa lainnya.²⁵

Menurut temuan *Intergovernmental Panel and Climate Change* (IPCC) yang merupakan sebuah lembaga panel internasional yang beranggotakan lebih

²³ Subandono Diposaptono, Budiman dan Firdaus Agung, *Menyiasati Perubahan Iklim Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, Penerbit Buku Ilmiah Populer, Bogor, 2009, hal. 2

²⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/2003_European_heat_wave diakses tanggal 28/11/08

²⁵ *Ibid.*

dari 100 negara di seluruh dunia, di tahun 2005 terjadi peningkatan suhu di dunia 0,6-0,7 (1 derajat Fahrenheit) sejak 1861.²⁶ IPCC memprediksi peningkatan temperatur rata-rata global akan meningkat 1,4-5,8 derajat Celcius (2,5-10,4 derajat Fahrenheit) pada tahun 2100. Sedangkan di Asia peningkatan temperature rata-rata lebih tinggi sampai mencapai 10 kali lipat. Ketersediaan air di negeri-negeri tropis berkurang sampai 10-30 % akibat melelehnya Gletser (gunung es) seperti pegunungan Himalaya dan mencairnya Kutub Selatan.²⁷ Seluruh dunia saat ini juga merasakan perubahan ini dengan semakin panjangnya musim panas dan semakin pendeknya musim hujan, selain itu makin maraknya badai dan banjir di kota-kota besar di seluruh dunia atau meningkatnya suhu udara yang sangat ekstrem diberbagai tempat.

B. Dampak Perubahan Iklim di Indonesia

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pemanasan global ini mengakibatkan melelehnya bongkahan-bongkahan es di daerah kutub dan mencairnya gletser-gletser di beberapa belahan dunia. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan berdampak langsung pada naiknya level permukaan air laut. Apabila seluruh Greenland mencair maka level permukaan laut akan naik sampai dengan 7 meter, dan itu cukup untuk menenggelamkan seluruh pantai, pelabuhan, dan daratan rendah di seluruh dunia.

Apabila para peneliti dan ilmuwan mengungkapkan secara *gamblang* tentang pemanasan global maka kita akan mengetahui begitu dahsyatnya efek

²⁶ Dadang Rusbiantoro, *Global Warming For Beginner-Pengantar Komprehensif Tentang Pemanasan Global*, O₂, Yogyakarta, 2008, hal. 8

²⁷ *Ibid.*

pemanasan global dalam jangka panjang. Mungkin Indonesia akan kehilangan beberapa pulau atau bahkan kemungkinan Indonesia akan tenggelam. Dengan naiknya permukaan air laut karena dampak pemanasan global maka satu per satu pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam. Dari hasil pendataan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), selama dua tahun terakhir (2005-2007) ini ada 24 pulau yang tenggelam karena penggalian pasir, erosi, dan perubahan alam. Diperkirakan sekitar 2.000 pulau akan tenggelam pada tahun 2030-2050 karena pemanasan global.²⁸

Lebih dari dua per tiga kota-kota besar di dunia juga akan terkena dampak pemanasan global. Salah satunya adalah Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia yang sebagian besar berada di dekat laut. Jakarta adalah satu dari 180 kota di dunia yang 70% wilayahnya berada di kawasan pantai berelevasi rendah yang terancam oleh naiknya permukaan laut akibat global. Negara-negara seperti Tokyo, New York, Mumbai di India, dan India pun juga ikut terancam.

Dampak perubahan iklim di Indonesia dapat dibagi dua menurut masanya, yaitu :²⁹

a) Jangka Pendek

Di Indonesia, kurang lebih 70% pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negative, baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan, serta meningkatkan angka kematian bayi Indonesia.

²⁸ Suara Pembaharuan, 17 Juni 2007

²⁹ Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, Penebarplus+, Jakarta, 2007, hal. 38

Perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global akan meningkatkan berbagai macam penyakit terhadap manusia juga akan berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan karena terganggu. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak negatif pada kehidupan di daerah pesisir pantai. Karena gelombang pasang dan banjir yang sering terjadi, hujan lebat, badai, kekeringan yang silih berganti, sulitnya ketersediaan air bersih, serta penyebaran berbagai penyakit.

Dalam jangka pendek, dampak ini telah terasa dan berpengaruh langsung dalam kehidupan masyarakat di Indonesia walau belum sedahsyat perkiraan pada jangka panjang.

b) Jangka Panjang

Beberapa dampak pemanasan global dalam jangka panjang antara lain, sebagai berikut :

1) Tenggelamnya pulau dan kota serta terancamnya kelestarian karang

Apabila air laut naik secara perlahan ke darat setinggi 1 meter saja maka kota-kota yang terletak di pesisir pantai akan tenggelam. Banyak kota-kota tersebut yang merupakan kota besar dan merupakan 'urat nadi' Indonesia, misalnya Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Manado. Gangguan atau terputusnya 'urat nadi' tersebut akan mengganggu kondisi ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, pemerintahan dan lain-lain.

Bagi Indonesia, kenaikan permukaan air laut berpotensi menenggelamkan 50 meter daratan dari garis pantai Kepulauan Indonesia. Dampak pemanasan

global terhadap wilayah pesisir, berdasarkan penelitian, diperkirakan tahun 2050 wilayah Cengkareng akan terendam, termasuk Istana Negara, jika kenaikan air mencapai 0,8 mil meter dan setidaknya 6,5 persen penduduk Indonesia akan merasakan dampaknya terutama yang berada di wilayah pesisir.³⁰ Bila panjang garis pantai 81.000 km maka sekitar 405.000 hektar daratan Indonesia akan tenggelam. Ribuan pulau kecil pun akan lenyap dari peta Indonesia ditelan air laut. Selain itu, juga ratusan ribu hektar tambak dan sawah di daerah pasang surut akan hilang. Abrasi pantai dan intrusi air laut pun mengganggu penduduk yang sebagian besar hidup di kawasan dataran rendah.

Kurangnya kesadaran akan budi daya mangrove oleh masyarakat memicu abrasi wilayah pesisir pantai. Mangrove dapat mengurangi abrasi dan meredam ombak saat terjadinya pasang. Begitu pula dengan karang. Karang selain sebagai tempat hidup ikan, dapat pula meredam hantaman laju ombak ke pesisir pantai. Keberadaan karang terancam karena banyaknya masyarakat pesisir mengeksploitasinya dengan berlebihan untuk kebutuhan ekonomi, sehingga berangsur-angsur jumlah karang menjadi berkurang dan terancam punah.

2) Iklim berubah-ubah dan rawan daerah kering

Pergeseran musim akibat perubahan iklim dan cuaca yang berubah-ubah telah mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah di Indonesia sehingga menambah rumit terhadap swadaya beras. Dampak yang lebih besar yaitu meningkatnya keluarga miskin.

³⁰ <http://satudunia.oneworld.net/?q=node/2256> diakses pada tanggal 22/12/08

Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan antara lain :

- Menurunnya produktifitas, khususnya di wilayah pantai akibat naiknya suhu global,
- Meningkatnya frekuensi kejadian iklim ekstrim sehingga kehilangan produksi akibat bencana kekeringan dan banjir meningkat,
- Kerawanan pangan meningkat di wilayah rawan bencana kekeringan dan banjir,
- Masalah penyakit tanaman berpotensi untuk berkembang.

3) Rawan longsor

Hampir setiap waktu kita mendengar berita adanya tanah longsor, jalan putus, maupun rumah tertimbun tebing di daerah rawan longsor. Ada sekitar 918 lokasi rawan longsor di Indonesia. Lokasi tersebut terdapat di :³¹

- Jawa Tengah : 327 lokasi
- Jawa Barat : 276 lokasi
- Sumatera Barat : 100 lokasi
- Sumatera utara : 53 lokasi
- Yogyakarta : 30 lokasi
- Kalimantan Barat : 23 lokasi

Lokasi sisanya tersebar di NTT, Riau, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur. Setiap tahunnya kerugian yang ditanggung akibat bencana tanah longsor sekitar Rp 800 miliar. Selain dari biaya, tanah longsor juga mengancam sekitar 1

³¹ Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, Penebarplus+, Jakarta, 2007, hal.41

juta jiwa manusia. (data diambil dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi).³²

Penting bagi Indonesia menganggap akan Negara berkembang untuk perlu segera mempersiapkan diri terhadap kemungkinan adanya bencana yang terkait iklim, seperti badai tropis, banjir, kekeringan, tanah longsor, kenaikan air laut (*sea level rise*), abrasi dan erosi, serta terganggunya kesehatan baik langsung (*heat stress*, kanker kulit) maupun tidak langsung (peningkatan kasus ISPA, gizi buruk, peningkatan kepadatan vektor penyakit). Perubahan iklim juga berdampak sangat signifikan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti melaut untuk mencari ikan dan terganggunya budi daya pantai dan laut.

Hal utama yang perlu segera ditangani di Negara berkembang adalah menyiapkan peralatan/teknologi untuk memprediksi cuaca yang akurat dan canggih, termasuk persiapan sumber daya manusia dan pendanaannya. Bantuan dana dari Negara maju ke Negara berkembang untuk persiapan tersebut sangat mendukung. Jika dana tidak mencukupi maka bantuan pengembangan teknologi tersebut bisa dilaksanakan secara regional.

C. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), organisasi yang dibentuk oleh para pecinta lingkungan hidup yang memiliki kesamaan keinginan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pergerakan Walhi tidak hanya berfokus pada masalah

³² Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, Penebarplus+, Jakarta, 2007, hal.42

lingkungan hidup, namun meluas kepada permasalahan sosial, politik dan kebijakan yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan. Oleh karena itu, Walhi menjadi wahana untuk menyalurkan atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tentang kelangsungan kehidupan dan lingkungan baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

WALHI, baik di tingkat lokal maupun internasional diantaranya melalui jaringan *Friends of Earth International*, secara terus-menerus meningkatkan kepedulian pada isu-isu global, seperti utang luar negeri dan liberalisasi perdagangan. Walhi juga menangani isu-isu spesifik dibidang lingkungan hidup, seperti kehutanan, pertambangan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim yang sekarang ini menjadi fenomena alam yang dampaknya mempengaruhi eksistensi kehidupan manusia di dunia.

C.1. Sejarah Terbentuknya Walhi

Ketika Soeharto membentuk kabinet baru, ditunjuklah Menteri Lingkungan Pertama, yaitu Emil Salim. Setelah dua bulan diangkat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim berdialog dengan beberapa kawannya, seperti Bedjo Raharjo, Erna Witoelar, Ir.Rio Rahwartono (LIPI), dan Tjokropranolo (Gubernur DKI), untuk membicarakan agar lingkungan menjadi sebuah gerakan dalam masyarakat. Bukan hanya itu tujuannya, tetapi Emil Salim merasa bahwa ia harus belajar tentang lingkungan, karena ia melihat bahwa lingkungan ini adalah sesuatu yang baru dan belum populer di Indonesia.³³ Ia

³³ <http://www.emawitoelar.co.id> diakses tanggal 27 November 2008

ingin terjun ke tengah-tengah masyarakat agar persoalan-persoalan lingkungan di masyarakat bisa diketahui dan dicarikan solusi oleh masyarakat.

Dalam diskusi-diskusi yang berlangsung secara informal dengan kawan-kawannya, bagi Emil Salim tidak ada pilhan lain, kecuali meminta bantuan *Himpunan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup* (HUKLHI), kelompok NGO dan pecinta alam. Harapan Emil agar HUKLHI, kelompok NGO dan pecinta alam dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan, karena kelompok ini dianggap mempunyai kedekatan dengan masyarakat. Sehingga pemerintah melalui lembaga ini bisa menyampaikan programnya kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat yang tidak bisa menyampaikan pemohonnya kepada pemerintah bisa disampaikan melalui NGO.

Hingga suatu saat Tjokropranolo menawarkan sebuah ruangan untuk melakukan pertemuan kelompok NGO se-Indonesia. Tanpa pikir panjang, Emil Salim langsung menerima tawaran Tjokropranolo untuk melakukan pertemuan NGO seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan di Lantai 13, Balai kota (Kantor Gubernur DKI Jakarta), jalan Merdeka Selatan.³⁴

Tidak disangka sama sekali, pertemuan mendadak tersebut dihadiri sekitar 350 lembaga yang terdiri dari lembaga profesi, hobi, lingkungan, pecinta alam, agama, riset, kampus, jurnalis dan lain sebagainya. Disitulah Emil Salim mengungkapkan semua keinginannya bahwa antara pemerintah, dan NGO harus berjalan bersama untuk mewujudkan lingkungan yang baik, juga diungkapkan bahwa masyarakat harus membantu program-program pemerintah dalam bidang

³⁴ http://www.walhi.or.id/ttgkami/profil_wlh/ diakses pada tanggal 23 November 2008

lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Gafur (saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga), datang menjenguk. Kabarnya, ia ingin mengetahui apa yang akan dilakukan kelompok NGO dan tanggapan kelompok ini terhadap pemerintah. Agar pertemuan tersebut tidak sia-sia, mereka harus mencari bagaimana memelihara komitmen bersama sekaligus mencari cara berkomunikasi yang efektif di antara mereka

Pertemuan antara Menteri Lingkungan baru, Emil Salim, HUKLHI, beberapa NGO dan pecinta alam menghasilkan terbentuknya koalisi sepuluh NGO, yaitu kelompok sepuluh, untuk menjembatani antara Menteri baru dan masyarakat pada umumnya. Agar tidak ada persepsi bahwa organisasi ini adalah sebagai organisasi politik, maka namanya dilengkapi dengan kelompok sepuluh pengembangan lingkungan hidup yang dideklarasikan pada 23 Mei 1978 di Balaikota. Kelompok Sepuluh ini merupakan wadah untuk tukar informasi, tukar pikiran dan penyusunan program bersama mengenai masalah lingkungan hidup di Indonesia sampai lingkungan hidup di dunia, demi terpeliharanya kelestarian lingkungan makhluk hidup umumnya dan manusia khususnya.³⁵

Anggota kelompok ini adalah *Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI)*, dengan ketua Ir. Zein Rachman, *Yayasan Indonesia Hijau (YIH)*, dengan Dr. Fred Hehuwed, *Biology Science Club (BCS)* yang diketuai oleh Dedy Darnaedi, *Gelanggang Remaja Bulungan*, yang diketuai oleh Bedjo Raharjo, *Perhimpunan Barang Indonesia (PBI)* dengan ketua H. Kamil Oesman, *Perhimpunan Pecinta Tanaman (PPT)* yang diketahui oleh Ny. Mudiati Jalil, *Grup Wartawan Iptek*

³⁵ <http://www.ernawitoelar.co.id> diakses tanggal 27 November 2008

yang diketahui oleh Soegiarto PS, *Kwarnas Gerakan Pramuka* oleh Dr. Poernomo, *Himpunan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup* (HUKLHI) oleh George Adjidjondro, dan *Srutamandala* (Sekolah Tinggi Publisistik).³⁶

Namun, dalam perjalannya, Srutamandala tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota organisasi, karena kegiatannya bersifat individual, meskipun ada bentuk organisasinya. Sehingga jumlahnya menjadi sembilan organisasi. Keanggotaan tersebut dirasakan masih kurang dan harus ditambah dengan beberapa organisasi sehingga lebih mempunyai power untuk melakukan kegiatan. Untuk itulah dilakukan penambahan keanggotaan Kelompok Sepuluh Pengembangan Lingkungan Hidup. Yang kemudian masuk adalah *Yayasan Pendidikan Kelestarian Alam* yang diketahui oleh Ny. Aziz Saleh, *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia* yang diketahui oleh Zumrotin, *Persatuan Radio Swasta Niaga Indonesia* (PRSSNI), *Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial* (LPES), *Ikatan Arsitek Indonesia* (IAI) dan *Harian Sinar Harapan* yang diwakili oleh Winarta Adisoebata. Meskipun keanggotaannya tidak lagi sepuluh organisasi, namun nama Kelompok Sepuluh tetap dipertahankan untuk memberikan penghargaan kepada sepuluh organisasi pendirinya.

Kelompok ini diketahui oleh Ir. Zein Rachman (IALI), dengan sekretaris I, yaitu Dedy Darnaedi (BSCc) dan Sekretaris II, Bedjo Rahardjo (GRJS-Bulungan). Untuk menjalankan kegiatannya, kelompok ini menempati sebuah ruangan di Kantor PPLH, dengan tugas utama menjadi jembatan antara pemerintah dengan

³⁶ *Ibid.*

LSM lainnya.³⁷ Beberapa NGO ini menawarkan bantuan sukarela kepada Emil Salim untuk membantu menjadi sukarelawan di kantor yang baru tersebut. Namun, kehadiran Kelompok Sepuluh dirasakan belum memenuhi keinginan kelompok NGO untuk menjadi wadah kegiatan lingkungan serta masih perlunya wadah untuk melakukan sosialisasi lingkungan di kalangan masyarakat. Sementara itu, sifat Jawa atau Jakarta sentris yang sempit dari Kelompok Sepuluh menjadikan pendukung-pendukungnya kurang senang, karena mereka ingin melihat organisasi ini tumbuh menjadi organisasi lingkungan nasional. Oleh karena itu, dengan bantuan Kantor Emil Salim dan *Wild Life Fund Indonesia* yang diketahui oleh almarhum Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono IX, diadakanlah pertemuan nasional Ornop-ornop di Jakarta pada tahun 1980, yang disebut dengan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup 1.

Pertemuan berlangsung pada tanggal 13-15 Oktober 1980, di Gedung YTKI bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Pusat Studi Lingkungan (PSL) se-Indonesia.³⁸ Pertemuan tersebut diikuti oleh 130 orang peserta dari 78 organisasi dari tiga kelompok, yaitu kelompok organisasi masyarakat (agama, sosial), organisasi pecinta alam, dan organisasi profesi tokoh yang dianggap menonjol saat itu antara lain George Junus Aditjondro dari Bina Desa, MS Zulkarnaen dari Yayasan Mandiri Bandung, Satjipto Wirosardjono dari PKBI, Rudy Badil dari Mapala UI, dan Zen Rahman dari IAI. Dari kalangan PSL Kampus tercatat nama Otto Soemarwoto, Hasan Poerbo, Soeratno Partoatmodjo, Abu Dardak, dan lain-lain. Pertemuan tersebut berlangsung alot karena

³⁷ Majalah Tanah Air. Oktober 1984. No. 43 Tahun IV. Hal. 6-8

³⁸ http://www.walhi.or.id/ttgami/profil_wlh/ diakses pada tanggal 23 November 2008

kecurigaan sebagian peserta dari kelompok pecinta alam dan aktivis kampus bahwa organisasi payung yang dibentuk tidak jauh berbeda misalnya, dengan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan lain-lain organisasi yang dibentuk dan dimobilisasi pemerintah.

Bahkan, untuk nama organisasi yang akan menjadi wadah dari NGO yang mengikuti acara ini sempat deadlock. Kamis sore, menjelang penutupan tetap belum diperoleh sebuah nama. Erna Witoelar, salah seorang panitia yang tampak panik, mondar-mandir sambil sesekali menyekatkan keringat dikening dan pipinya. Wajahnya tampak tegang, ia dan beberapa panitia pencetus pertemuan tersebut, kebingungan. Lembaga NGO yang awalnya tampak sepakat dengan tujuan ternyata kembali membawa nama lembaganya masing-masing. Ada semacam ketakutan bahwa antar lembaga tersebut akan terjadi saling mengkooptasi. Beberapa anggota kelompok sepuluh, seperti Zen Rahman, Nashihin Hasan, mulai melakukan lobi kepada peserta yang saat itu sedang deadlock. George Adi Tjondro yang menjadi anggota kelompok sepuluh malah paling keras dalam persoalan nama, alasannya adalah tidak mau seperti Golkar atau underbow lembaga manapun. Oleh karena itu, pemilihan nama itu memakan waktu cukup lama. Setelah deadlock, sidang dilanjutkan dengan break, saat itulah lobi tahap kedua dilanjutkan, kali ini lobi difokuskan untuk mendekati kelompok muda yang terdiri dari pecinta alam dan kelompok agama yang takut terkooptasi ideologinya.

Setelah sidang hampir ditutup, Wicaksono Noeradi mengusulkan nama Wahana kepada Erna Witoelar. Wicaksono menjelaskan arti wahana sebagai

vehicle atau *means*³⁹. Entah karena sudah mau penutupan atau memang sepakat, Erna melesat masuk ke ruangan dan kemudian duduk di depan sidang. Ia menawarkan nama Wahana dengan penjelasan arti wahana sehingga namanya menjadi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nama ini dianggap independen, tidak underbow kepada salah satu organisasi/parpol, serta mencerminkan nama khas Indonesia atau bukan nama asing. Peserta mulai riuh kembali. Saling tanya dan berceletuk tentang nama tersebut. George Adijitjondro yang paling vokal soal nama mengacungkan jari dan menyatakan setuju dengan nama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Beberapa lembaga kemudian juga mengacungkan jari tanda setuju. Ketika Erna menawarkan bagaimana dengan nama Wahana Lingkuw Hidup Indonesia, mayoritas menyatakan setuju.

Kamis malam, tanggal 15 Oktober 1980, palu diketok, nama disepakati: *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*.⁴⁰ Suasana haru malam itu, ketika peserta bergandeng tangan sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum penutupan. Lilin ditiup oleh Erna sebagai tanda bahwa acara telah usai. Deklarasi dilakukan bersamaan dengan penutupan Konferensi Pusat Studi Lingkungan (PSL) seluruh Indonesia. Selain memutuskan pembentukan Wahana Lingkungan Hidup dengan mengadakan musyawarah periodik setiap dua tahun, juga dipilih sembilan anggota presidium periode 1980-1982 yang diketuai oleh Zen Rachman, dengan sekretaris eksekutif, Ir. Erna Witoelar.

Ketakutan indoktrinasi pemerintah ditandai dengan kesepakatan aktivis ornop untuk menetapkan tiga asas organisasi non pemerintah (ornop) yang

³⁹ Wicaksono Noeradi. *Revolusi Berhenti di Hari Minggu*. Gramedia. 1999

⁴⁰ http://www.walhi.or.id/ttgkami/profil_wlh/ diakses pada tanggal 23 November 2008

bergabung dengan WALHI, yaitu asas mandiri, bekerjasama tanpa ikatan, dan bekerja nyata bersama dan untuk masyarakat.⁴¹ Selain itu, dalam pertemuan tersebut, juga sudah muncul kesadaran bahwa intervensi pemerintah dalam NGO mencerminkan iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Untuk itulah, dibutuhkan kepekaan untuk membaca persepsi masyarakat, agar program yang dijalankan sesuai dengan keinginan rakyat.

Untuk itulah para aktivis LSM itu mendeklarasikan WALHI dalam bentuk forum sebagai bentuk yang paling dapat diterima saat itu yaitu forum LSM lingkungan dengan sifat keanggotaan yang egaliter dan longgar, dan berperan sebagai forum komunikasi. Untuk memudahkan koordinator Walhi membentuk presidium yang dijalankan oleh seseorang sekretaris eksekutif. Tugas presidium pertama WALHI dalam masa dua tahun kepengurusannya, terutama melakukan fungsi-fungsi kehumasan organisasi. Hubungan dengan lembaga pemerintah dijelaskan sebagai hubungan yang tetap dijaga jaraknya dan bersifat timbal balik. Dengan alasan tetap menjaga jarak, para aktivis itu menyatakan tidak bergabung atau membantu Emil di kementerian sebagai staf.

C.2. Profil Organisasi Walhi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. WALHI hadir di 26 propinsi dengan 436 organisasi anggota dan merupakan forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (Ornop/NGO), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya

⁴¹ Majalah Tanah Air. Edisi No. 1/ November 1980. hal. 2

Masyarakat (KSM) yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan.

WALHI melakukan kampanye internasional bersama berbagai jaringan internasional lainnya yang memiliki keprihatinan yang sama terhadap ketidakadilan lingkungan hidup. Salah satunya dengan menjadi anggota Friends of the Earth International (FoEI) – federasi lingkungan hidup sedunia dengan 71 organisasi anggota di 70 negara, dan memiliki lebih dari satu juta anggota individu.

C.2.1. Kelembagaan Dalam Walhi

Sebagai forum, WALHI menganut sistem pemerintahan yang demokratis dengan prinsip tanggung gugat dan transparan. Di tingkat nasional. Eksekutif nasional menjalankan program-program nasional organisasi, sementara kelembagaan yang merupakan representasi seluruh anggota untuk menjalankan fungsi legislatif disebut dewan Nasional.

Eksekutif nasional dan daerah dipilih melalui pemilihan langsung, struktur organisasi dibangun berdasarkan prinsip Trias Politica untuk menjamin pelaksanaan pembagian kekuasaan dan kontrol dan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan.

Eksekutif nasional dan eksekutif daerah, dewan nasional dan dewan daerah dan majelis etik nasional adalah bagian dari trias politica WALHI yang menjalankan hak dan kewajiban dan tercantum dalam statuta. Untuk memastikan

jalannya organisasi, posisi direktu eksekutif dibatasi maksimal hingga dua kali masa jabatan selama tiga tahun.⁴²

WALHI ada di 26 provinsi di Indonesia. Semua menjalankan forumnya dengan independen, termasuk pendanaan dan pengelolaannya. Di tingkat nasional, eksekutif nasional berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam aktivitas nasional dan internasional.

C.2.2. Visi dan Misi Walhi

Visi WALHI adalah terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat.⁴³ Sementara isu-isu strategis yang diupayakan oleh WALHI adalah:

- 1) WALHI mandiri
- 2) Tata pemerinthan yang baik dan bersih
- 3) Membangun perlawanan rakyat dan melawan imperialisme (penjajahan baru)

Misi WALHI sebagai gerakan lingkungan hidup adalah:⁴⁴

- 1) WALHI adalah jaringan pembela lingkungan hidup yang independen untuk mewujudkan tatanan masyarakat dan tatanan lingkungan hidup yang adil serta demokratis.
- 2) WALHI percaya hak lingkungan hidup yang sehat dan layak adalah HAM.

⁴² http://www.walhi.or.id/ttgkami/profil_wlh/ diakses pada tanggal 23 November 2008

⁴³ http://www.walhi.or.id/ttgkami/profil_wlh/ diakses pada tanggal 23 November 2008

⁴⁴ *Ibid.*

- 3) WALHI menjunjung tinggi keadilan gender, hak-hak masyarakat marjinal dan hak-hak makhluk hidup.
- 4) WALHI percaya gerakan lingkungan hidup harus berkembang menjadi gerakan sosial yang mengutamakan solidaritas, aksi-aksi konfrontatif yang kreatif, dan tanpa kekerasan.
- 5) WALHI percaya organisasi yang demokratis, terbuka, bertanggung jawab, dan profesional, akan mampu melindungi hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang adil, harus dilakukan secara arif dan berkelanjutan oleh berbagai kelompok masyarakat yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Disadari bahwa perjuangan tersebut dari hari ke hari semakin dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama yang bersumber pada:⁴⁵ Pertama, semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global melalui agenda-agenda pasar bebas dan hegemoni paham liberalisme baru (neo liberalisme). Kedua semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan di dalam negeri terhadap kepentingan negara industri atau rejim ekonomi global. Rezim kapitalisme global menempatkan rakyat, lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahkan bumi, sebagai tumbal akumulasi kapital. Dominasi dan penetrasi tersebut telah memposisikan negara menjadi perpanjangan tangan kapitalisme global. Akibatnya kebijakan sosial,

⁴⁵ http://www.walhi.or.id/ttgkami/profil_wlh/ diakses pada tanggal 23 November 2008

ekonomi, politik pun diwarnai oleh semangat liberalisasi dan privatisasi yang memudahkan ekspansi modal dan globalisasi pasar. Watak kebijakan negara pada akhirnya membuka jalan bagi perampasan secara sistematis hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya rakyat.⁴⁶

Kalangan organisasi non pemerintah maupun berbagai kelompok individu yang peduli dengan kepentingan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat sudah sejak awal mempersoalkan berbagai kebijakan negara yang menghancurkan dan merampas hak-hak rakyat atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Untuk merespon berbagai persoalan lokal, nasional maupun global, pada 1980 beberapa organisasi non pemerintah (Ornop) dan beberapa individu yang memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan mendirikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Sejak saat itu, WALHI berkembang menjadi forum organisasi non pemerintah yang memposisikan diri sebagai wahana yang bersinergikan semua potensi gerakan advokasi lingkungan dan penguatan posisi dan akses rakyat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Bahkan pada perjalanan selanjutnya, WALHI memposisikan diri sebagai bagian dari gerakan rakyat dan gerakan sosial untuk melawan dominasi kekuatan kapitalisme global dan kebijakan negara yang bertanggung jawab atas perampasan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya rakyat yang terjadi di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

⁴⁶ Christ Harman. *Globalisasi dan perlawanan*, disadur dan diterjemahkan oleh Julian dan Setiabudi dari *Anti Capitalisme Theory and Pracice*, International Socialisme No. 88, London, 2000

Dengan pilihan posisi seperti itu, Walhi sesungguhnya hendak menegaskan kepada para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan baik negara PBB, organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, perusahaan multinasional maupun kelompok lain yang potensial merusak lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Menghadapi realitas di atas, WALHI mengemban misi sebagai wahana perjuangan penegakan kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk pemenuhan keadilan, pemerataan sosial, pengawasan rakyat dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan demokratis.

C.2.3. Pengambilan Keputusan Dalam WALHI

Forum pengambilan keputusan tertinggi WALHI adalah dalam pertemuan anggota setiap tiga tahun yang disebut pertemuan nasional lingkungan hidup (PNLH). Forum ini menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Eksekutif Nasional, dewan nasional serta Majelis Etik Nasional, merumuskan strategi dan kebijakan dasar WALHI, menetapkan dan memisahkan statuta, serta menerapkan eksekutif nasional, dewan nasional dan majelis etik nasional. Setiap tahun diselenggarakan pula Konstitusi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) sebagai forum konsultasi antar komponen WALHI dan evaluasi program WALHI. Format pengambilan keputusan yang sama juga terjadi di forum-forum WALHI daerah.

Pengambilan keputusan dalam kelembagaan Walhi dilakukan melalui rapat-rapat yang terdiri dari:⁴⁷

- 1) Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH)
- 2) Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup Luar Biasa (PNLH LB)
- 3) Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH)
- 4) Rapat Pleno Dewan Nasional
- 5) Rapat Pleno Dewan Daerah
- 6) Rapat Kerja Eksekutif Nasional
- 7) Rapat kerja eksekutif daerah

C.2.4. Sumber Dana Walhi

Sumber pendanaan WALHI berasal dari iuran anggota, sumbangan masyarakat serta lembaga dana lainnya baik lokal, nasional maupun internasional, sepanjang tidak mengikat dan tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan visi misi serta nilai-nilai WALHI-WALHI juga melakukan usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi misi serta nilai-nilai WALHI. Dana tersebut dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan yang benar dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada komponen WALHI dan kepada publik. Sumber Dana Walhi diperoleh dari:⁴⁸

1. Iuran anggota

⁴⁷ http://www.walhi.or.id/ttgkami/profil_wlh/ diakses pada tanggal 23 November 2008

⁴⁸ *Ibid.*

2. Sumbangan dari masyarakat, swasta atau lembaga lainnya baik nasional maupun internasional sepanjang tidak mengikat dan tidak bersumber dari:
 - a) Hasil kegiatan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
 - b) Utang luar negeri maupun pemberian dan lembaga pemberi hutang yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
 - c) Dana yang berasal dari korupsi dan kejahatan ekonomi
3. Usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi misi dan nilai-nilai Walhi

C.2.5. WALHI dan Politik

Sejak melakukan advokasi, secara langsung maupun tidak langsung, WALHI telah bersentuhan dengan masalah-masalah struktural dan politik. Persoalan Lingkungan di Indonesia adalah persoalan politik karena pada dasarnya, semua kerusakan lingkungan terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang keluar dari berbagai kepentingan dan arah politik. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, WALHI selalu kritis dengan persoalan-persoalan politik.

Dalam pembukaan Anggaran Dasar 1996, WALHI memandatkan bahwa untuk mencapai tujuan terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, maka perlu menjadi bagian dari gerakan demokratisasi. Hal ini merupakan kesadaran bahwa rintangan terbesar dalam mencapai tujuan WALHI adalah sistem politik Indonesia yang otoriter dengan

keterlibatan militer yang sangat besar dan sangat kecil ruang bagi gerakan politik dan demokratisasi. Pada April 1998, WALHI kemudian merubah prioritas enam bulanan menjadi 70% politik dan 30% reguler (Emmy Hafild, Laporan Tahunan 1998 – 1999).⁴⁹

Juli 1999, WALHI mendaftar sebagai Utusan Golongan di MPR dengan tujuan agar isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam menjadi isu sentral selain demokratisasi lainnya. Namun, hal ini dibatalkan karena anggota WALHI yang hadir dalam Pertemuan Nasional Lingkungan PNLH ke - VII di Banjarmasin tidak mengizinkan WALHI masuk dalam parlemen. Mulai saat itulah, WALHI ‘dianggap’ telah terjun ke politik. Padahal, sesungguhnya sejak tahun 1988, di mana WALHI mulai melakukan advokasi, secara langsung maupun tidak langsung, WALHI selalu bersentuhan dengan persoalan lingkungan. Persoalan Lingkungan di Indonesia adalah Persoalan Politik. Inilah kesimpulan WALHI. Karena semua kebobrokan lingkungan itu didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang keluar dari berbagai kepentingan politik. Parahnya, tidak satupun partai politik yang mempunyai kepedulian pada politik. Meskipun dalam pada saat kampanye, persoalan lingkungan menjadi agenda utama beberapa partai politik.⁵⁰ Hasil Riset WALHI tahun 1999 menunjukkan bahwa 48 partai politik peserta Pemilu, hanya ada empat partai politik yang menempatkan lingkungan sebagai agenda utama, yaitu PDI Perjuangan, PAN, PK, dan PKB. Sayangnya, tidak satu partai pun yang merealisasikan agenda tersebut, termasuk PDI Perjuangan, sebagai partai pemenang Pemilu.

⁴⁹ http://www.walhi.or.id/ttgkami/profil_wlh/ diakses pada tanggal 23 November 2008

⁵⁰ <http://www.ernawitoelar.co.id> diakses tanggal 27 November 2008

Melihat kondisi itu, WALHI kemudian terlibat dalam pendidikan pemilih. Hal ini sempat menjadi perdebatan, namun langkah ini telah dilatarbelakangi oleh kesadaran mendalam atas proses demokratisasi yang salah satunya disandarkan pada Pemilu. WALHI sadar bahwa tidak satupun partai politik yang mempunyai kepedulian memadai pada masalah-masalah lingkungan. Selain itu, WALHI juga sadar bahwa dalam berbagai konflik lingkungan hidup terdapat kolaborasi antara kepentingan negara dan bisnis yang sangat kuat. Hal ini berakibat masyarakat menjadi tersudut dan lemah. Didasarkan hal tersebut, maka ada kewajiban untuk memperkuat posisi masyarakat melalui informasi dan pengetahuan. Salah satu caranya adalah dengan voters education (pendidikan bagi para pemilih), di mana masyarakat harus bisa secara kritis menentukan pilihan politiknya yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana masalah-masalah lingkungan akan disikapi oleh para pengambil keputusan. Sayangnya, program ini kurang berhasil, karena pada kenyataannya, di basis-basis WALHI partai-partai status quo tetap memenangkan pemilihan.

C.2.6. Menjadi Organisasi Publik

Tingkat kerusakan lingkungan hidup saat ini telah menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengabaian hak-hak asasi rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, marginalisasi, dan pemiskinan. Oleh karenanya, masalah lingkungan hidup harus didudukkan sebagai masalah sosial.

Sehingga gerakan lingkungan hidup perlu mentransformasikan dirinya menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh komponen masyarakat seperti

buruh, petani, nelayan, guru, kaum profesional, pemuda, remaja, anak-anak, dan kaum perempuan.

Menyadari tantangan tersebut, organisasi WALHI telah berubah menjadi organisasi publik yang tidak hanya beranggotakan organisasi non pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Organisasi publik yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada perseorangan yang peduli dan berminat terlibat serta mendukung gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini bertujuan mendorong percepatan gerakan lingkungan hidup menjadi gerakan sosial yang luas.

Perseorangan dan publik umum sekarang dapat bergabung menjadi anggota sahabat walhi dan terlibat secara aktif di dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup Indonesia.

C.3. WALHI dan Perubahan Iklim

Wilayah Asia Pasifik harus bersiap dan mendesak dunia melakukan tindakan yang jauh lebih konkret menghadapi perubahan iklim. Asia Pasifik akan mengalami dampak serius akibat perubahan iklim, kekeringan panjang, musim hujan yang pendek dengan intensitas tinggi, kenaikan muka air laut, kerentanan yang makin tinggi pada potensi kebakaran hutan dalam 20-30 tahun mendatang.

C.3.1. Save Our Borneo di Kalimantan

Eksekutif Daerah WALHI di Kalimantan pada tahun 2005, yaitu Berry Nahdian Forqon (Kalimantan Selatan), Yohanes (Kalimantan Barat), Syarifuddin (Kalimantan Timur) dan Nordin (Kalimantan Tengah) mendirikan Save Our Borneo (SOB) yang disahkan dengan akte notaris Ellys Nathalia, SH dengan akta

nomor 24 tanggal 29 Maret 2006.⁵¹ Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan semuanya, SOB yang semula adalah merupakan program internkoneksi antar WALHI se-Kalimantan di kukuhkan sebagai lembaga pada bulan Maret tahun 2006 yang berkedudukan di Palangkaraya.

SOB juga sudah bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam upaya men-sinergikan advokasi konversi hutan dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Dalam proses ini SOB menginisiasi adanya Aliansi SELANTING yang bertugas untuk melakukan advokasi untuk konversi hutan di Seruyan-Lamandau dan Tanjung Puting. Koalisi ini juga melibatkan Orangutan Foundation International, Pakat Borneo, WALHI Kalteng, Pokker SHK, Sawit Watch dan beberapa lembaga lainnya di Kalimantan Tengah.⁵²

SOB dibentuk dengan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan Kalimantan dilaksanakan secara adil dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang menghormati Hak Azasi Manusia, nilai-nilai kearifan masyarakat adat dan budaya lokal serta memperhatikan hak rakyat atas keberlanjutan kehidupan antar generasi.

Untuk mencapai tujuannya, maka segenap gerak langkah dan aktivitas SOB harus ditujukan bagi kepentingan rakyat diatas segalanya. Dimana rakyat harus diberikan dan mempunyai ruang yang cukup untuk menentukan pilihan pada pembangunan yang dibutuhkannya. Selain itu, rakyat juga harus diberikan hak untuk mengatakan TIDAK bagi pembangunan yang tidak dikehendaknya.

⁵¹http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/hutan/080210_save_our_borneo_und/, diakses pada tgl 27/10/08

⁵²http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/hutan/080210_save_our_borneo_und/, diakses pada tgl 27/10/08

SOB bekerja secara legal dengan mempengaruhi dan terlibat dalam penentuan kebijakan serta bekerja bersama kelompok masyarakat lainnya untuk menegakan supremasi dan kedaulatan rakyat dalam menentukan keberlanjutan dan sumber kehidupan.

Oleh karena itu, SOB bekerja untuk memperkuat kapasitas rakyat, melakukan kajian-kajian strategis, menjalankan propaganda pengelolaan asset alam dan sumber kehidupan yang berpihak kepada rakyat, mengumpulkan dan menyediakan data, dokumentasi dan informasi Kalimantan serta membangun jaringan dan kemitraan dengan segenap pihak yang berpotensi mendukung pencapaian tujuan penyelamatan Kalimantan dari dimensi ekologi, geo-politik dan tataran kearifan adat lokal.

C.3.2. Capacity Building in Asia and the Pacific on Issues Related to Future Actions on Climate Change

Pada tanggal 21-22 Agustus 2006, FoE International menghadiri seminar Kapasitas Pembangunan di Asia-Pasifik dalam issue tentang tindakan-tindakan masa depan berkaitan perubahan iklim (Capacity Building in Asia and the Pacific on Issues Related to Future Actions on Climate Change).⁵³ Proyek ini adalah suatu prakarsa untuk memudahkan intra-regional bertukar pendapat tindakan apa bisa diterima perubahan iklim antar negara-negara Asia-Pasifik, terutama antara negara berkembang. Melalui prakarsa ini pembuat kebijaksanaan, perunding, ilmuwan, penasehat, dan aktifis maupun pemerintah dari negara-negara Asia-Pasifik dapat berdiskusi untuk lebih terbuka, terus terang, transparan, sasaran, dan

⁵³ <http://www.walhi.or.id/kampanye/future-actions-on-climate-change/stos/>, diakses pada tgl 22 Oktober 2008

sejalan dengan prioritas pembangunan regional mereka. Pemerintah dari negara-negara Asia-Pacific juga diijinkan untuk berunding bila ada negosiasi internasional formal. Peneliti dari berbagai negara-negara yang dilibatkan didalam proyek yang akan berbagi studi dari negara-negara masing-masing. Negara-negara tersebut adalah Bangladesh, China, India, Indonesia, Jepang, Thailand. Keinginan FoE International dalam pembangunan di masa depan negara-negara di wilayah Asia-Pasifik untuk lebih peduli pada perubahan iklim, karena wilayah Asia Pasifik sangat rentan dari dampak perubahan iklim.

Banyak negara Asia-Pacific seperti Indonesia misalnya, sama sekali tidak menunjukkan kesiapannya dalam memperbaiki mutu lingkungan, merubah pengerahan sumber daya pembangunan, dan menata perekonomian rakyat agar lebih mampu bertahan pada iklim yang berubah. Namun dalam kenyataannya, kerusakan lingkungan semakin bertambah parah dan tidak teratasi. Dalam catatan WALHI/FoE-Indonesia sebagian besar bencana alam yang terjadi di tahun 2006 adalah bencana yang diakibatkan oleh salah urus lingkungan. Pembukaan wilayah-wilayah ekosistem penting untuk industri ekstraktif, perkebunan raksasa, dan perluasan infrastruktur semakin mempertinggi kerentanan pulau-pulau Indonesia bertahan dari perubahan iklim.⁵⁴

"Pemanasan global dan perubahan iklim adalah sinyal atas gagalnya model pembangunan saat ini. Perlu dilakukan reorientasi pembangunan dari paradigma yang hanya berorientasi pembangunan ekonomi menjadi pembangunan yang berorientasi keselamatan rakyat. Hal ini bisa dilakukan dengan pengerahan

⁵⁴ <http://www.walhi.or.id/kampanye/future-actions-on-climate-change/stos/>, diakses pada tgl 22/10/08

sumberdaya pembangunan untuk mengurangi kerentanan ekosistem dan sosial agar dapat bertahan dalam iklim yang berubah," kata Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif WALHI yang juga adalah anggota FoE International.⁵⁵

Deforestasi dan degradasi fungsi hutan adalah salah satu yang terbesar penyebab bencana ekologis. Ke depan, kondisi ini semakin buruk akibat ancaman riil perubahan iklim. Namun, sekalipun fakta telah berbicara secara gamblang, kebijakan dan sistem pengelolaan hutan tidak bergeming. Bahkan, terjadi proses pemindahan ancaman dalam tindakan menangani bencana. Pemenuhan kebutuhan kayu untuk rekonstruksi, pembukaan lahan untuk pemukiman atau lahan budidaya atau membuka lapangan kerja adalah alasan pemerintah untuk menutup bencana.

C.3.3. Jeda Tebang

Memasuki tahun 2007, Jeda Tebang adalah antiklimaks kebijakan yang paling sering diucapkan di sektor kehutanan. Sejumlah punggawa kunci pemerintahan sendiri juga menyebutkan jeda tebang adalah cara terbaik untuk keluar dari berbagai bencana dan dampak negatif dari ekstraktif industri di sektor kehutanan. Jeda Tebang ketika kali pertama diperkenalkan oleh WALHI pada tahun 2001 segera saja menuai pro dan kontra. Dengan 2,8 juta orang kepala keluarga yang mengambil manfaat secara langsung dari bisnis kehutanan ditambah 8 miliar dolar devisa yang diperoleh tentu Jeda Tebang akan mengancam eksistensi nilai ekonomi tersebut.

⁵⁵ http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/070528_htn_indo_cu/ di akses pada tanggal 01/11/08

Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Chalid Muhammad menyebutkan bahwa jeda tebang pada saat ini adalah pilihan yang paling masuk akal. "Setiap menitnya kita kehilangan hutan seluas lima kali lapangan sepakbola dan ini hanya bisa terjadi akibat salah kelola dalam kehutanan Indonesia."⁵⁶

"Indonesia membutuhkan jeda tebang untuk melakukan perbaikan pada sistem kelola dan kebijakan yang saling tumpang tindih. Jeda tebang juga sekaligus memberikan kesempatan bagi hutan untuk mengambil nafas dari aktivitas ekstraksi yang menciptakan berbagai dimensi bencana ekologis," sambung Chalid Muhammad.⁵⁷

Jeda Tebang adalah pilihan yang paling masuk akal. Setiap tahunnya hutan Indonesia seluas 2,72 juta hektar musnah. Setiap menitnya, hutan seluas lima kali lapangan sepakbola musnah, sama dengan lenyapnya hutan seluas Pulau Bali per tahun. Melihat pada cadangan Hutan Produksi yang tersisa yang masih memiliki tutupan baik seluas 41,25 juta ha, melihat pasokan bahan baku kayu dari hutan tanaman industri hanya sanggup memenuhi kebutuhan industri pulp, dan melihat bahwa biofuel akan memicu percepatan pelepasan kawasan untuk perkebunan kelapa sawit, diperkirakan bahwa pada tahun 2012 hutan alam di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi akan musnah. Harga kayu di empat pulau, termasuk Jawa akan melonjak tinggi karena seluruh kayu harus dikirim dari Papua. Pada tahun 2022, seluruh hutan alam Indonesia akan musnah dan harga kayu kembali melonjak naik karena kayu harus diimpor dari China dan atau Vietnam.

⁵⁶ http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070328_jdtbng_htnaceh_ps/ diakses pada tanggal 06/11/08

⁵⁷ *Ibid.*

Percepatan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat memang sanggup menekan angka penebangan. Namun, bila Hutan Tanaman Rakyat dibangun pada tahun 2008, maka hasilnya baru akan diperoleh pada tahun 2016, dimana hutan alam di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah punah mengikuti jejak hutan alam di Jawa.⁵⁸

Jeda tebang idealnya dilaksanakan paling sedikit 15 tahun. Masa limabelas tahun dianggap cukup untuk memberikan kesempatan kepada hutan untuk melakukan regenerasi, menghitung ulang kebutuhan riil masyarakat Indonesia, menyusun strategi pemenuhan kayu nasional melalui perbaikan tata kelola dan kebijakan disektor kehutanan dan mempersiapkan konseptual Sistem Hutan Kerakyatan yang bisa jadi didorong melalui skema Hutan Tanaman Rakyat

"Proses menuju sebuah Jeda Tebang dapat dilakukan dalam waktu kurang dari satu tahun dan terdiri dalam tiga tahap yaitu penghentian pengeluaran ijin-ijin baru, rencana penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam dan tahap ketiga dengan menghentikan seluruh penebangan hutan dan rencana penyelesaian masalah-masalah sosial," sambung Rully Syumanda.⁵⁹

- **Keuntungan Jeda Tebang**

Jeda tebang (*moratorium logging*) akan memberikan keuntungan ganda dalam perbaikan pengelolaan sumberdaya hutan dan industri perkayuan yang berkelanjutan, antara lain:⁶⁰

⁵⁸ http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070328_jdtbng_htnaceh_ps/ diakses pada tanggal 06/11/08

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Jeda Tebang: Solusi dari Bencana Ekologis*, http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/moratoriumlogging_220407/ diakses pada tanggal 06/11/08

- a) Memberikan ruang politik dan ekologi kepada hutan alam untuk ‘bernafas’ dan menahan berlanjutnya kehancuran hutan tropis di Indonesia;
- b) Memberikan kesempatan terbaik untuk memonitor pelaksanaan lacak balak (timber-tracking) dan audit kayu bulat serta penyergapan terhadap penebangan liar melalui teknologi monitoring satelit;
- c) Memberikan kesempatan untuk menata industri kehutanan dan hak-hak tenurial (penguasaan) sumber daya hutan, dan meningkatkan hasil sumber daya hutan non-kayu;
- d) Mengoreksi distorsi pasar kayu domestik dengan membuka kran impor seluas-luasnya, sehingga harga pasar kayu domestik sebanding dengan harga kayu bulat dunia;
- e) Lewat mekanisme pasar, melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi industri olah kayu dan mengoreksi kapasitas industri yang berlebih: hanya industri yang melakukan bisnis dengan benar dan bersaing yang dapat melanjutkan bisnisnya dan yang mengandalkan suplai kayu haram dengan sendirinya tidak akan mampu bersaing;
- f) Lewat mekanisme pasar, memaksa industri olah kayu meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku; dan
- g) Lewat mekanisme pasar, mendorong industri pulp untuk secara serius membangun hutan-hutan tanamannya.

- **Kerugian Bila Jeda Tebang Tidak Dilaksanakan**

Indonesia akan mengalami kerugian besar pada masa yang akan datang apabila tidak memberlakukan jeda tebang (moratorium logging) saat ini, di antara kerugian itu adalah sebagai berikut:⁶¹

- a) Pemerintah tidak dapat memonitor kegiatan penebangan haram secara efektif;
- b) Distorsi pasar tidak dapat diperbaiki dan pemborosan kayu bulat akan terus terjadi;
- c) Tidak ada paksaan untuk industri untuk meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku atau untuk mengimpor lebih banyak;
- d) Industri pulp akan menunda-nunda pembangunan hutan-hutan tanaman dan semakin jauh akan menghancurkan hutan alam;
- e) Defisit industri kehutanan sebesar Rp1,484 triliun rupiah per tahun dari penebangan liar dan bencana tidak bisa dihentikan;
- f) Hutan dataran rendah di Sumatera akan habis pada 2009, Hutan dataran rendah Kalimantan akan habis dalam lima tahun mendatang dan Hutan dataran rendah Papua akan habis pada 15 tahun mendatang;
- g) Kita akan kehilangan basis industri di luar pulp yang menghasilkan devisa sebesar US\$ 4 milyar pada masa yang akan datang dan bila sumber daya hutan telah habis, dan ratusan ribu pekerja di sektor ini akan kehilangan pekerjaannya dalam masa 7 tahun mendatang;

⁶¹ *Jeda Tebang: Solusi dari Bencana Ekologis*, http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/moratoriumlogging_220407/ diakses pada tanggal 06/11/08

- **Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Reformasi Kehutanan**

Pada sidang CGI ke-9, tanggal 1-2 Februari tahun 2000, di Jakarta, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyampaikan 8 komitmen pemerintah dalam bidang kehutanan, sebagai berikut:⁶² (1) moratorium konversi hutan alam; (2) penutupan industri sarat utang; (3) penghentian penebangan hutan secara liar; (4) restrukturisasi industri olah kayu; (5) rekalkulasi nilai sumber daya hutan; (6) pengaitan program reforestasi dengan kapasitas industri; (7) desentralisasi urusan kehutanan; dan (8) penyusunan program kehutanan nasional.

Dalam penyusunan rencana aksi (action plan) pada bulan November 2000, komitmen ini ditambah menjadi: (9) penanggulangan kebakaran hutan; (10) penataan kembali hak-hak tenurial; (11) melakukan inventarisasi sumber daya hutan; dan (12) memperbaiki sistem pengelolaan hutan.

Ke-12 langkah tersebut diyakini dapat membawa perubahan mendasar dalam kehutanan menuju pengelolaan sumber daya hutan yang lebih berkelanjutan (lestari). Untuk melaksanakan seluruh komitmen tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk InterDepartmental Committee on Forestry (IDCF) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 tahun 2000 pada tanggal 7 Juni 2000, sebuah badan yang akan mengoordinasikan dan melaksanakan seluruh komitmen pemerintah di bidang kehutanan tersebut.

⁶² *Jeda Tebang: Solusi dari Bencana Ekologis*, http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/moratoriumlogging_220407/ diakses pada tanggal 06/11/08

- **Tahapan Jeda Tebang dan Implementasi Reformasi Kehutanan**

Jeda Tebang hanyalah proses, bukan tujuan akhir. Jeda Tebang menawarkan kemungkinan-kemungkinan pelaksanaan seluruh rencana reformasi dan pelaksanaan komitmen pemerintah di sektor kehutanan. Jeda Tebang juga menjadi langkah awal bagi pelaksanaan seluruh reformasi tersebut.

Langkah-langkah Jeda Tebang dapat dilakukan selama tiga tahun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶³

- Tahap I: Penghentian pengeluaran ijin-ijin baru

Penghentian pemberian atau perpanjangan ijin-ijin baru HPH, IPK, perkebunan, serta mengeluarkan kebijakan impor bagi industri olah kayu. Jeda perizinan adalah syarat mutlak dan menjadi bagian sekaligus tahap pertama pelaksanaan Jeda Tebang di Indonesia. Komitmen reformasi yang dapat dilaksanakan pada tahap ini adalah Komitmen # 1 (Moratorium konversi hutan alam) dan Komitmen # 10 (penataan kembali hak-hak tenurial).

- Tahap II: Pelaksanaan uji menyeluruh kinerja industri kehutanan

Dalam waktu 2 bulan setelah Jeda Tebang dilaksanakan, penghentian ijin HPH bermasalah terutama yang memiliki kredit macet yang sedang ditangani oleh BPPN. Utang harus dibayar kembali oleh pemilik dan penegakan hukum dilakukan bagi industri-industri yang bermasalah. Pada tahap ini penilaian asset industri-industri bermasalah harus dilaksanakan melalui due diligence secara independen oleh pihak ketiga. Pada tahap ini, pemerintah dapat

⁶³ *Jeda Tebang: Solusi dari Bencana Ekologis*, http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/moratoriumlogging_220407/ diakses pada tanggal 06/11/08

mengimplementasikan Komitmen # 2 (Penutupan industri sarat utang); serta Komitmen # 5 (Rekalkulasi nilai sumber daya hutan).

➤ Tahap III: Penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam

Dalam waktu 6 bulan, pemerintah harus menghentikan seluruh penebangan kayu di Sumatera dan Sulawesi, kedua pulau ini hutannya sangat terancam. Penataan kembali wilayah hutan di Sumatera dan Sulawesi serta penanganan masalah sosial akibat Jeda Tebang dengan mempekerjakan kembali para pekerja pada proyek-proyek penanaman pohon dan pengawasan hutan, seperti yang terjadi di Cina. Pada tahap ketiga ini, pemerintah dapat melaksanakan Komitmen # 4 (Restrukturisasi industri olah kayu); Komitmen # 6 (Pengaitan program reforestasi dengan kapasitas industri); Komitmen # 7 (Desentralisasi urusan kehutanan), dan Komitmen # 3 (Penghentian penebangan hutan secara liar).

➤ Tahap IV: Penghentian sementara seluruh penebangan hutan dan penyelesaian masalah-masalah potensi sosial

Dalam waktu satu tahun jeda tebang dilaksanakan, pemerintah dapat menghentikan seluruh kegiatan penebangan kayu di Kalimantan dan penanganan masalah sosial yang muncul sejauh ini dan selama masa Jeda Tebang dilaksanakan melalui sebuah kebijakan nasional. Sedangkan untuk daerah perlu disiapkan Protokol Resolusi Konflik dan Standar Pelayanan Ekologi menjadi wacana yang berkembang luas.

Pada masa ini pula, Pemerintah dapat menyusun kebijakan untuk memberikan insentif bagi pembangunan industri hilir komoditas unggulan yang

tujuannya untuk menyerap tenaga kerja dari sektor kehutanan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Pada tahap ini, langkah-langkah reformasi dapat dilaksanakan dengan melaksanakan Komitmen # 12 (Memperbaiki sistem pengelolaan hutan); serta Komitmen # 8 (Penyusunan program kehutanan nasional).

➤ Tahap V: Larangan sementara penebangan hutan di seluruh Indonesia

Dalam waktu 2-3 tahun: penghentian seluruh penebangan kayu di hutan alam untuk jangka waktu yang ditentukan di seluruh Indonesia. Pada masa ini, penebangan kayu hanya diizinkan di hutan-hutan tanaman atau hutan yang dikelola berbasis masyarakat lokal. Pada tahap ini, pemerintah dapat menjalankan Komitmen # 9 (Penanggulangan kebakaran hutan); dan Komitmen # 11 (Melakukan inventarisasi sumber daya hutan).

Selama jeda tebang dijalankan, industri-industri kayu tetap dapat jalan dengan cara mengimpor bahan baku kayu. Dengan melanjutkan penggunaan bahan baku kayu dari dalam negeri, pada dasarnya kita sama saja dengan melakukan bunuh diri. Untuk memudahkan pengawasan tersebut, maka jenis kayu yang diimpor haruslah berbeda dengan jenis kayu yang ada di Indonesia.

Jeda tebang merupakan langkah yang tepat dalam menyelamatkan kondisi hutan Indonesia sekarang ini. Apabila jeda tebang ini benar-benar terlaksana dengan baik maka pelepasan emisi yang mengakibatkan pemanasan global dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Selain jeda tebang ini, WALHI ikut serta dalam aksi bersama Menolak Perluasan HTI pada pertemuan The Forest Dialogue (TFD)

di hotel Aryaduta, Pekanbaru pada tanggal 7 Maret 2007. Dalam aksi ini Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Rakyat dan masyarakat Riau menyatakan sikap:⁶⁴

- a) Mendesak pemerintah RI untuk menghentikan proses pelelangan lahan eks. HPH menjadi HTI
- b) Mendesak Menteri Kehutanan agar tidak memberikan izin konversi hutan alam di Taman Nasional Tesso Nilo menjadi HTI PT. RAPP
- c) Mendesak Pemerintah RI untuk mengeluarkan kebijakan ambang batas kapasitas produksi industri bubur kertas di Riau
- d) Mendesak Pemerintah RI untuk segera mengeluarkan kebijakan moratorium penebangan hutan dan menjadikannya program prioritas Departemen Kehutanan
- e) Mendesak Pemerintah RI untuk segera menghentikan segala macam bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat
- f) PEMPROV Riau harus segera meratifikasi protocol resolusi konflik ORNOP ke dalam PERDA, guna meminimalisir konflik pertanahan di Riau
- g) Perusahaan harus bertanggungjawab atas biaya *recovery* lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat Riau

Menyambut peringatan Hari Bumi pada Minggu, 22 April 2007, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengadakan serangkaian acara menarik

⁶⁴ http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070328_jdtbng_htnaceh_ps/ diakses pada tanggal 06/11/08

untuk semua Sahabat WALHI yaitu Aksi Kreatif Sahabat Walhi Di Hari Bumi 2007 dengan tema "Selamatkan Hutan dengan Tanganmu!"

C.3.4. Pertemuan Friends of Earth International di Bogor

Anggota-anggota federasi Friends of the Earth International yang berkumpul di Bogor, tanggal 23-25 April 2007 menyimpulkan bahwa perubahan iklim adalah alarm terakhir dari gagalnya model pembangunan yang berlaku sekarang. FOE meminta agar kompensasi yang diberikan atas emisi gas rumah kaca pada negara berkembang bukan dalam bentuk sumbangan, tetapi lebih pada pemenuhan kewajiban negara maju sesuai dengan ketentuan Protokol Kyoto karena negara maju telah menghasilkan gas rumah kaca yang banyak. Selain itu, desakan agar emisi rumah kaca segera dikurangi juga kuat. Pertemuan ini merupakan persiapan masyarakat sipil terhadap putaran perundingan negara-negara penandatanganan Protokol Kyoto-UNFCCC di Bali Desember 2007.⁶⁵

"Tanda-tanda perubahan iklim dan buruknya dampak perubahan iklim merupakan seruan bagi masyarakat internasional untuk bertindak sekarang tanpa menunda lagi. Pemerintah-pemerintah akan mendiskusikan skema baru berdasarkan Protokol Kyoto paska 2012. Kami berharap negara-negara industri menunjukkan kepeloporannya dalam mereduksi emisi mereka sendiri," kata Catherine Pearce, Koordinator Kampanye Perubahan Iklim dan Energi Friends of the Earth Internasional.⁶⁶

⁶⁵ *Friends of the Earth Minta Indonesia Pelopori Penurunan Emisi di Negara Maju*, http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/070425_foe_emisi_cu/ diakses tanggal 22 Februari 2008

⁶⁶ http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/climate_250407/ diakses tanggal 29/12/08

Badan ilmiah PBB, IPCC dalam Laporan Assesment ke-4nya tahun ini, memperingatkan bahwa dunia sedang mengalami dampak yang luar biasa merusak akibat perubahan iklim terutama di negara-negara selatan terutama negara kepulauan seperti Indonesia. Kerusakan bahkan telah terjadi sekarang berdampak pada masyarakat yang tinggal di pesisir, petani, dan kelompok-kelompok yang terkena cuaca ekstrem. Penyebabnya adalah eksploitasi tanpa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh negara-negara industri seperti Jepang. Emisi karbon maupun jejak karbon Jepang tersebar di seluruh Asia.

C.3.5. Civil Society Forum for Climate Justice

WALHI juga mendirikan Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Keadilan Iklim (Civil Society Forum for Climate Justice) terbentuk atas konsensus yang disepakati pada 21 Mei 2007 dalam rangka acara COP 13/CMP 3. CSF untuk Inisiatif Keadilan Iklim adalah batu loncatan yang strategis untuk aksi nyata untuk solusi permanen dari penderitaan yang masih dan selalu berlangsung dan membebani tingkat populasi yang sangat tinggi di Indonesia. Forum ini akan mengakomodir setiap ketertarikan dari CSO dan Organisasi Masyarakat (PO), terutama bagi mereka yang mewakili suara dari komunitas rentan untuk proses politis dalam rapat UNFCCC. Gerakan strategis telah dimulai untuk menekan Pemerintah Indonesia agar lebih relevan dengan keadaan realitas dari komunitas yang rentan dan paling terkena dampak.⁶⁷

WALHI juga menyarankan bagi Pemerintah, Dunia Industri Dan Masyarakat secara bersama-sama melakukan upaya penyelamatan lingkungan.

⁶⁷ *Wiki-CSF for Climate Justice:Perihal*, http://wiki.csoforum.net/index.php?title=Wiki-CSF_for_Climate_Justice diakses tanggal 19 Juli 2007

Perlu gerakan publik untuk penyelamatan lingkungan agar terhindar dari bencana yang lebih besar, seperti halnya perubahan iklim.

PBB selaku organisasi terbesar di dunia mengadakan Konferensi Perubahan Iklim di Bali yang dilaksanakan pada tanggal 3-14 Desember 2007. Terselenggaranya Konferensi Perubahan Iklim di Bali menjadi harapan besar bagi masyarakat dunia termasuk diantaranya WALHI untuk menyadarkan publik akan efek pemanasan global yang makin hari makin meresahkan. Dan WALHI akan ikut serta dalam Konferensi Perubahan Iklim tersebut.

BAB III

Konferensi Perubahan Iklim PBB

Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 diselenggarakan di *Bali International Convention Center (BICC)*, Hotel The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia mulai tanggal 3 Desember-14 Desember 2007 untuk membahas dampak pemanasan global. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan persiapan negara-negara di dunia untuk mengurangi efek gas rumah kaca setelah Protokol Kyoto kadaluarsa pada tahun 2012.

Konferensi yang diadakan oleh badan PBB *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC)* ini merupakan kali ke-13 dan diikuti oleh sekitar sembilan ribu peserta dari 186 negara. Selain itu ada sekitar tiga ratus LSM internasional yang terlibat. Konferensi internasional ini diliput oleh lebih dari tiga ratus media internasional dengan jumlah wartawan lebih dari seribu orang.

A. Latar belakang konferensi

Konferensi perubahan iklim ini digelar sebagai upaya lanjutan untuk menemukan solusi pengurangan efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu, dalam konferensi ini juga akan membahas mengenai cara membantu negara-negara miskin dalam mengatasi pemanasan dunia.

Di dalam konferensi ini, terdapat tekanan untuk segera dapat mencari persetujuan global baru untuk memotong tingkat gas rumah kaca yang terus bertambah. Saat ini dari negara-negara maju emiten karbon utama dunia yang

menolak menjadi bagian dari Protokol Kyoto, hanya Australia dan AS yang menolak menandatangani Protokol Kyoto, namun dalam konferensi kali ini, delegasi Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang baru, Kevin Rudd, berjanji untuk meratifikasi Protokol Kyoto, yang akan menjadikan AS sebagai negara maju tunggal yang menolak ratifikasi tersebut.

Dalam diskusi konferensi, ada dua pihak yang menentukan yakni penghasil emisi dan penyerap emisi. Permasalahan yang sedang ditengahi adalah memberi nilai pada karbon. Selama ini pembangkit listrik tenaga batu bara dinilai lebih murah dibanding pembangkit listrik tenaga geothermal, karena karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara tidak dihitung sebagai biaya yang harus ditanggung. Sementara untuk para pemilik lahan (hutan) yang menjadi penyerap karbon akibatnya harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lahannya. Maka diperlukan pendapatan bagi pemilik lahan untuk memelihara lahannya. Pemilik lahan biasanya negara-negara berkembang, sedangkan penghasil karbon adalah negara-negara industri maju. Jadi negara-negara berkembang bisa memelihara hutannya dengan kompensasi dari negara-negara maju, sehingga semua pihak bertanggung jawab untuk pengelolaan karbon di bumi.

Konferensi Bali ini merupakan:⁶⁸

- Sesi ketiga belas Konferensi Para Pihak/KPP-12 (*Conference of Party/COP*)

⁶⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_PBB_untuk_Perubahan_Iklim diakses pada tanggal 01/11/08

- Sesi ketiga *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol/CMP-3*
- Sesi kedupuluh tujuh *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice/SBSTA-27*
- Sesi kedupuluh tujuh *Subsidiary BOdy for Implementation/SBI-27*
- Sesi keempat lanjutan *Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol/AWG-4*

A.1. Jalannya konferansi

Pembukaan konferensi dilakukan oleh Presiden Organisasi Pelaksana UNFCCC Konferensi Para Pihak/KPP-12 (*Conference of Party/COP*) David Mwiraria dari Kenya dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemilihan presiden KPP-13.

Pada acara pembukaan di Ruang Plenary yang dihadiri 1172 utusan dari 180 negara tersebut, dan Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, terpilih sebagai Presiden COP-13, menggantikan Presiden COP sebelumnya, David Mwiraria dari Kenya. Acara pembukaan diisi dengan penayangan rekaman video hari raya Nyepi di Bali yang disampaikan oleh Gubernur Bali Dewa Made Beratha yang menyebutkan bahwa perayaan Nyepi dapat mengurangi emisi 20 ribu ton karbon dioksida (CO₂) dalam sehari. Kemudian klimaks acara pembukaan adalah artis duta lingkungan Indonesia,

Nugie, yang membawakan lagu 'Dunia Berbagilah' yang menyerukan agar umat manusia sedunia untuk mencintai lingkungan.

Usai upacara pembukaan, peserta menjalani agenda hari pertama, yakni pembagian komisi sidang konferensi. Beberapa agenda yang dibahas dalam komisi adalah upaya penghijauan kembali hutan oleh negara-negara berkembang, dampak efek rumah kaca, dan amandemen sejumlah artikel dalam Protokol Kyoto.

Pada konferensi ini, delegasi Australia secara tegas menyatakan bergabung dengan Protokol Kyoto. Ini artinya pemerintahan negeri Kanguru di bawah kepemimpinan Kevin Rudd, secara resmi meratifikasi Protokol Kyoto.⁶⁹ Sikap Australia ini disampaikan secara resmi dalam pemandangan umum hari pertama konferensi. Secara kongkrit sikap Australia ini akan diteken PM Kevin Rudd, dalam pertemuan tingkat kepala negara tanggal 10-14 Desember.

Pertemuan UNFCCC di Bali yang seharusnya ditutup pada tanggal 14 Desember 2007 diperpanjang sehari dikarenakan perundingan berjalan alot. Setelah diskusi selama berjam-jam, akhirnya sidang menyetujui Peta Jalan Bali (Bali Roadmap) yang akan membuka jalan untuk mencapai perjanjian baru tentang pemanasan global tahun 2009. Terobosan bisa dicapai setelah AS yang menerima sejumlah tekanan pada sidang pleno, akhirnya menyepakati peta jalan untuk menegosiasikan perjanjian iklim yang baru, menggantikan Protokol Kyoto yang berakhir tahun 2012.

A.2. Harapan dan tuntutan Non-Government Organization (NGO)

⁶⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_PBB_untuk_Perubahan_Iklim diakses pada tanggal 01 November 2008

Tanggal 12-14 Desember 2007 para menteri lingkungan dari 130 negara membahas sejumlah usulan, rancangan dan kertas kerja yang dihasilkan dalam perundingan selama satu pekan silam. Tujuan akhir dari KTT Iklim kali ini adalah menyepakati suatu roadmap menuju kesepakatan iklim internasional yang akan berlaku setelah tahun 2012.

Perundingan di Bali mandeg. Begitu penilaian Farah Sofa dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Peralunya, selama ini negara-negara maju bersikeras menuntut partisipasi lebih besar negara berkembang dalam mereduksi emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, negara berkembang menagih komitmen negara maju yang andilnya lebih besar dalam melepaskan karbondioksida ke atmosfer. Situasi ini makin diperumit oleh keragaman kepentingan antar negara berkembang, kata Farah Sofa: “Kita tahu di negara-negara berkembang ada grup OPEC misalnya, kemudian ada juga negara dengan hutan yang besar, selain itu ada small island countries. Negara-negara ini semua mempunyai kepentingan yang agaknya sulit disatukan, karena kemudian basis ekonomi mereka adalah sumber daya alam yang sedang jor-joran diperjual-belikan di konferensi ini untuk mendapatkan pembiayaan terbesar.”⁷⁰

Menurut Farah Sofa, perundingan selama ini terlalu fokus pada mekanisme dan solusi jangka panjang. Perdagangan karbon serta pengurangan emisi karbondioksida melalui pencegahan kerusakan hutan tak menjawab masalah masyarakat yang merasakan langsung dampak perubahan iklim, begitu kritik yang dilontarkan wakil direktur Walhi. Greenpeace beranggapan bahwa hampir tidak

⁷⁰ <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2999354,00.html> diakses pada tanggal 25/11/08

semua orang mengerti tentang penyelamatan bumi yang hadir dalam perundingan tersebut.⁷¹

Organisasi Lingkungan Pelangi melihat tercapainya suatu roadmap menuju kesepakatan iklim pasca Protokol Kyoto sebagai ukuran keberhasilan KTT Iklim di Bali. Gustya, pemerhati masalah iklim dari Organisasi Lingkungan Pelangi memperkirakan, Bali belum akan menghasilkan kesepakatan yang mengikat. “Yang menjadi sukses di Bali adalah bagaimana tercipta suatu batu loncatan untuk melancarkan negosiasi dua tahun berikutnya. Selain itu juga ada beberapa isu seperti adaptation fund, bagaiman institusi yang akan dipilih untuk mendapat hak mengelola adaptation fund.”⁷²

Adaptation Fund atau dana adaptasi disediakan untuk membantu negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Selama ini pengelolaan dana adaptasi dikritik karena dianggap tidak transparan dan birokrasinya terlalu berbelit-belit. Negara berkembang menuntut agar akses pada dana adaptasi dipermudah. Selain itu pengelolaannya dipercayakan pada suatu lembaga baru yang khusus dibentuk untuk tugas ini.

Dana adaptasi juga merupakan bagian agenda yang diusung Organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Bali. Di masa depan PMI memperkirakan bencana akibat perubahan iklim di Indonesia akan bertambah. Karena itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Mari'e Muhammad menyerukan agar semua negara peserta, baik negara maju maupun berkembang menunjukkan komitmennya di Bali: “Mereka harus ada komitmen tegas, kemudian program

⁷¹ <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2988318,00.html> diakses pada tanggal 25/11/08

⁷² <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2999354,00.html> diakses pada tanggal 25/11/08

aksi dan tindakan-tindakan yang nyata. Itu tidak bisa tidak, harus di bawah kepemimpinan pemerintah. Apapun kesepakatan yang dicapai. Untuk mekanisme adaptasi dan mitigasi itu memerlukan dana yang besar, dan dana tidak akan datang tanpa suatu komitmen.”⁷³

A.3. Hasil konferensi

Tiga hal penting yang merupakan hasil UNCCC yaitu,⁷⁴ pertama, tercapainya kesepakatan dunia yang disebut Bali Roadmap. Kedua, disepakatinya 4 agenda yaitu: Aksi untuk melakukan kegiatan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (mis. Kekeringan dan banjir); cara-cara untuk mereduksi emisi GRK; cara-cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan climate friendly technology; pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi. Dan kesepakatan ketiga, adanya target waktu, yaitu 2009.

Sedangkan Bali Roadmap sendiri meliputi lima hal yaitu :⁷⁵

- a) Komitmen Pasca 2012 (*AWG on long-term cooperative action under the convention*),

Semua Parties menyadari diperlukannya reduksi penurunan emisi global yang lebih besar (*deeper cut*) sebesar 25-40% sebagai komitmen lanjutan dari negara maju (annex-I Protokol Kyoto) sesuai dengan AR4 IPCC.

Proses penyelesaian hingga 2009 (Ad-Hoc Working Group on Long Term Cooperative Action under the Convention). Peningkatan aksi mitigasi perubahan

⁷³ <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2999354,00.html> diakses pada tanggal 25/11/08

⁷⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_PBB_untuk_Perubahan_Iklim diakses pada tanggal 01/11/08

⁷⁵ *Ibid.*

iklim secara nasional internasional dalam kerangka *common but differentiated responsibilities* :⁷⁶

- Negara maju untuk komitmen membentuk rencana aksi dalam melakukan langkah menurunkan emisi GRK yang terukur, dilaporkan dan terverifikasi.
- Negara berkembang melakukan mitigasi dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan melalui bantuan teknologi, peningkatan kapasitas, pendanaan, melalui cara-cara terukur, nyata dan dapat dilaporkan.

b) Adaptasi/Dana Adaptasi (*Adaptation Fund*),

Tindakan aksi adaptasi seperti kerjasama internasional dalam kajian kerentanan, kajian kebutuhan pendanaan.

Disepakatinya elemen operasional *Adaptation Fund*, yaitu: *operating entity*, fungsi, komposisi keanggotaan, quorum, pengambilan keputusan, *chairmanship*, *frequency of meetings*, *observer*, transparansi, sekretariat, *trustee*, *monetization*, *access to funding*, pengaturan institusi, dan *review*.

Badan Dana Adaptasi (*Adaptation Fund Board*) sebagai *operating entity*, GEF sebagai Sekretariat dan *trustee* oleh World Bank. Perwakilan Indonesia (Mahendra Siregar) disetujui sebagai *Chairman of Adaptation Fund Board*.

Pendanaan adaptasi bersumber dari 2% hasil penjualan CER (*certified emissions reduction*) dari proyek CDM yang memiliki dana Euro 37 juta (akan meningkat 80-300 juta USD periode 2008-2012).

⁷⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_PBB_untuk_Perubahan_Iklim diakses pada tanggal 01/11/008

c) Alih Teknologi (*Technology transfer*),

Peningkatan tindakan pengembangan teknologi dan transfer pada dukungan aksi mitigasi dan adaptasi (Peningkatan dari tingkat pembahasan teknis hingga implementasi). Mempercepat jalan penyebaran, penggunaan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan. Peningkatan aksi pada penyediaan sumber keuangan dan dukungan investasi pada tindakan mitigasi dan adaptasi serta kerjasama teknologi. Memperkuat akses pendanaan bagi negara berkembang.

GEF sebagai operational entity untuk penerapan Convention akan menyiapkan "a strategic program" untuk peningkatan development, deployment, diffusion teknologi.

d) REDD (*Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries*)

Semua Negara pihak menyepakati bahwa langkah nyata dalam mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan kepentingan mendesak. Program kerja telah ditetapkan dan difokuskan pada, misalnya, kajian perubahan tutupan lahan dan emisi GRK, metode untuk mendemonstrasikan pengurangan emisi dari deforestasi. Hal ini penting untuk mengangkat kebutuhan komunitas lokal dan warga asli. Persetujuan dilakukannya demonstration activities degradasi, deforestrasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dimasukkan dalam mekanisme REDD National dan Sub-National baselines.

e) CDM (*Clean Development Mechanism*)

Distribusi pelaksanaan CDM sampai level sub-regional. Programmatic of activity sudah dapat diusulkan ke Executive Board. Perubahan Skala AR CDM

dari 8 kton menjadi 16 kton yang dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah, dengan kriteria *low income communities* ditentukan oleh negara tuan rumah. Langkah ini akan memperluas jumlah proyek dan distribusi proyek di Negara-negara yang sebelumnya tidak dapat ikut serta dalam kategori proyek ini.

Carbon Capture and Storage, Negara pihak mempertimbangkan dimasukkannya CCS-formasi geologi ke dalam proyek CDM. Mereka menyepakati untuk meneruskan kajian lebih jauh dan menyusun rencana kerja tahun 2008 (teknis, legal, kebijakan dan aspek pendanaan). CCS secara luas diakui sebagai teknologi penting untuk melanjutkan penggunaan bahan bakar minyak yang “bersih”. LDC, Least Developed Countries segera pihak menyetujui untuk memperpanjang mandate LDC’s Expert Group. Group ini memberikan saran mengenai kajian adaptasi yang diperlukan LDC, mengingat kebutuhan adaptasi di LDC harus didukung karena kapasitas yang rendah dalam beradaptasi.

Dengan adanya Konferensi Perubahan Iklim ini, WALHI meminta publik untuk lebih menekankan arti penting menjaga dan memelihara alam. Efek pemanasan global yang menimbulkan bencana alam yang dirasakan selama ini menjadi bumerang bagi manusia yang tidak menghiraukan alam. Maka dari itu, WALHI memikirkan tindakan-tindakan selanjutnya dalam menangani efek pemanasan global di Indonesia.

B. Indonesia Pasca Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007

Penggunaan pendanaan karbon untuk melindungi hutan mendapat dukungan luas dari pemerintah, termasuk negara-negara dengan area hutan yang luas seperti Indonesia, namun ditentang oleh banyak organisasi masyarakat sipil

yang mengambil hak asasi manusia sebagai titik awal mereka. Penurunan deforestasi merupakan cara yang relatif mudah dan murah untuk menghasilkan penurunan emisi global sementara negara-negara Utara terus saja melanjutkan apa yang selama ini mereka lakukan.

Keprihatinan lain terhadap REDD adalah bahwa skema pencegahan deforestasi dapat mengalihkan perhatian dari prioritas yang lebih mendesak yaitu pengurangan tingkat konsumsi energi per kapita dari negara-negara maju (AS berada di posisi teratas), dan pemangkasan tingkat emisi keseluruhan di negara berpenduduk besar seperti Cina dan India dimana kombinasi antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar telah melambungkan tingkat emisi gas rumah kaca. Pernyataan masyarakat sipil di Bali tersebut memperingatkan bahwa perdagangan karbon telah digunakan sebagai tindak penyamaran untuk mengelak dari peraturan dan menunda aksi mendesak yang diperlukan untuk mengurangi emisi dan mengembangkan solusi alternatif yang rendah karbon.

Kalangan aktivis lingkungan pesimis dengan adanya REDD, upaya penyelamatan hutan di Indonesia saja masih terlihat kurang serius. Hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatra, lalu Papua, masih saja diganggu. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, hutan-hutan lindung pun terus dijarah hingga menyisakan ruang-ruang terbuka.

Perilaku eksploitatif, dengan beragam alasan pembedaannya, seperti menemukan penguatan ketika pemerintah mencetuskan kebijakan baru pada Februari 2008: izin pembukaan hutan alam dan kawasan lindung untuk pertambangan terbuka dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2008.

Peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas penerimaan nasional bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang berlaku pada departemen kehutanan. Hanya berselang dua bulan setelah berakhirnya konferensi perubahan iklim PBB 2007.

Pro-kontra mengenai peraturan tersebut mengalir deras. Yang setuju, beralasan PP tersebut dibuat hanya bagi 13 perusahaan yang tahun 2004 sudah memperoleh izin sehingga ada aroma abritase di sana bila tak diatur. Yang menolak, mendasarkan pada kondisi kehancuran lingkungan yang amat parah. Dilihat dari kenyataan yang ada peraturan itu tidak hanya diperuntukkan bagi 13 perusahaan tambang untuk menambang secara terbuka. Namun, mengatur pula kompensasi bagi rencana lain, seperti jalan tol, telekomunikasi, industri migas, dan infrastruktur energi terbarukan.

Menurut WALHI Jatim, jika kawasan hutan lindung di Jatim dibuka untuk eksplorasi tambang maka akan ada 11 juta penduduk yang terdampak. Sebaiknya para pengambil kebijakan mau belajar dari bencana seperti lumpur lapindo yang dipicu nafsu mengeksplorasi tambang di kawasan padat penduduk. Sehingga bisa saja apa yang diprediksikan para, hutan Indonesia akan musnah paling lambat tahun 2012 mendatang jika tidak ada segera dilakukan reformasi tata kelola kehutanan.⁷⁷

Indonesia sebagai carbon sink seharusnya menjaga dan melestarikan hutan agar dapat lebih banyak menyerap karbon di udara. Target waktu yang disepakati

⁷⁷ SURYA, 22 April 2008

juga hampir habis. Kelanjutan konferensi perubahan iklim akan diselenggarakan di Poznan, Polandia pada bulan Desember 2008.

BAB IV

Upaya WALHI Menangani Pemanasan Global

Berakhirnya Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 bukan berarti berakhirnya penanganan dampak perubahan iklim dunia. WALHI pun tidak tinggal diam, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim yang makin lama berdampak makin ekstrem sebagai langkah menuju Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen, Denmark dengan mengkampanyekan pelestarian alam dan aktif terlibat dalam pertemuan lingkungan hidup internasional.

A. Kampanye Pelestarian Alam

Kampanye yang dilakukan WALHI dalam pelestarian hutan dilakukan untuk menanggapi deforestasi hutan yang makin lama makin meningkat. Kerusakan hutan bila tidak ditanggulangi akan mengakibatkan bencana ekologis yang meresahkan masyarakat Indonesia.

A.1. Dukung Donasi Selamatkan 11,4 Juta Hektar Hutan Indonesia

Kampanye Dukung Donasi ini diselenggarakan atas kekecewaan WALHI dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan mengundang keprihatinan mendalam bagi masyarakat yang mencintai lingkungan.

Dalam peraturan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2008, pemerintah telah mengizinkan pembukaan hutan atau pengalihfungsian hutan

untuk kepentingan "pembangunan" dan investor dengan tarif Rp 1,2 juta per hektar pertahun hingga Rp 3 juta per hektar per tahun, atau Rp 120 per meter hingga Rp 300 per meter. Dengan keberadaan peraturan tersebut, hutan lindung dan hutan produksi tak berharga lagi. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2008, para pemodal diberi kemudahan membat hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan pertambangan dan usaha lain, hanya dengan membayar Rp 300 setiap meternya.⁷⁸Peraturan ini sama sekali tidak mengedepankan keprihatinan atas sejumlah bencana nasional yang menimpa Indonesia yang selama ini disebabkan salah urus dan peraturan yang sangat tidak berkeadilan ekologis.

"Itu harga hutan termurah yang resmi dikeluarkan sepanjang sejarah negeri ini. Hanya Rp. 120 hingga Rp. 300 per meternya, lebih murah dari harga sepotong pisang goreng yang dijual pedagang keliling, Yang menyesakkan, PP ini keluar ditengah ketidak becusan pemerintah megurus hutan. Laju kerusakan hutan sepanjang 2005 hingga 2006 saja mencapai 2,76 juta ha. Juga, disaat musim bencana banjir dan longsor yang terus menyerang berbagai wilayah." Tutur Rully Syumanda, Manajer Kampanye Kehutanan Walhi Nasional.⁷⁹

Perusahaan asing sekelas Freepot, Inco, Ri Tito, Newmont, Newcrest, Pelsart jelas diuntungkan oleh PP ini, demikian pula perusahaan nasional macam Bakrie, Medco, Antam dan lainnya. Saat ini, lebih 158 perusahaan pertambangan

⁷⁸ http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konversi/080216_htn_lindung_sp, diakses pada tgl 03 Maret 2008

⁷⁹ <http://www.cixers.co.cc/2008/03/dukung-donasi-selamatkan-114-juta.html>, diakses pada tgl 03 Maret 2008

memiliki ijin di di kawasan lindung, meliputi luasan sekitar 11, 4 juta hektar.⁸⁰ Pemerintah selalu beralasan ketiadaan biaya untuk melakukan penjagaan hutan sehingga pendanaan yang akan diperoleh dari penghancuran 11,4 juta hektar hutan lindung melalui skema PP 2/2008 akan digunakan untuk menyelamatkan hutan tersisa.

Melalui kampanye ini WALHI menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendonasikan uangnya untuk menyelamatkan hutan lindung. Karena setiap Rp 300 yang didonasikan masyarakat telah berkontribusi untuk melakukan penyelamatan hutan seluas 1 meter persegi. Setelah donasi terkumpul akan diserahkan kepada Menteri Keuangan. Hanya dengan minimal Rp. 600/m²/dua tahun masyarakat telah berkontribusi menyelamatkan 11,4 juta hektar hutan Indonesia dan turut berpartisipasi dalam upaya mengurangi laju perubahan iklim.

A.2. Kampanye HELP Keadilan Iklim

Perubahan iklim merupakan fakta yang tidak terhindarkan. Berbagai kelompok masyarakat menghadapi masalah karena tingginya tingkat anomali iklim dan cuaca di seluruh Indonesia, dan mendapatkan dampak dari fenomena tersebut secara langsung. Sekretariat nasional JATAM bersama Civil Society Forum (CSF), Walhi Kalsel dan Jatam Kaltim mengkampanyekan Keadilan Iklim dengan tema HELP - Human Security, Ecological Debt, Land Right, Production and Consumption, tema ini memiliki kaitan perubahan iklim dengan penggerusan sumber daya alam di berbagai pulau di Indonesia, termasuk Kalimantan.⁸¹

⁸⁰ http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konversi/080216_htn_lindung_sp, diakses pada tgl 03 Maret 2008

⁸¹ *Kampanye HELP Keadilan Iklim!*, <http://help.jatam.org/?p=1> diakses pada tanggal 10 Mei 2009

Petani kesulitan untuk bercocok tanam, karena musim yang tidak tentu, sering menggagalkan benih untuk tumbuh. Bagi nelayan, perubahan cuaca yang tidak menentu membuat ketidak pastian keberlanjutan hidup nelayan makin tinggi. Lalu ketersediaan pangan bagi masyarakat menipis, kelangkaan air bersih dan ledakan penyakit merupakan risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat di manapun.

Pemanasan global dan perubahan iklim bukanlah sekedar fakta ilmiah, atau "sekedar" kejadian es mencair dan beruang kutub yang sulit bertahan hidup. Tetapi Pemanasan global adalah tentang bagaimana kehidupan di muka bumi harus bertahan dalam situasi yang berkeadilan. Bukan hanya sekedar "jual beli karbon" yang menafikan kehidupan masyarakat rentan. Jika dirunut lebih jauh, perubahan iklim merupakan bukti dari kegagalan model pembangunan global dalam menjaga kehidupan warga dunia, untuk melindungi produktivitas kelompok masyarakat di negara berkembang dalam mencapai kehidupan yang sejahtera, dan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mempertahankan jasa ekologi.

Kebijakan menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan keberhasilan upaya penanggulangan perubahan iklim di Indonesia. Perencanaan maupun pelaksanaan upaya adaptasi maupun mitigasi perlu dilandaskan pada suatu kerangka kebijakan yang jelas. Pertemuan Bali pada Desember 2007 seharusnya bisa menjadi momentum yang cukup baik ditingkat nasional untuk menyusun kerangka hukum yang lebih jelas. Namun sikap pemerintah ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Penerbitan PP 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan, merupakan kebijakan yang sangat bertolak belakang dari pertemuan Bali. Kebijakan tersebut tidak menggambarkan perhatian Indonesia terhadap keberlanjutan hutan di Indonesia. PP 2 tahun 2008, membuka kemungkinan besar untuk membiarkan perusahaan tambang memasuki wilayah hutan dengan memberikan kompensasi uang yang jumlahnya sangat tidak sebanding. Sedangkan untuk PP 3 tahun 2008, terlihat bahwa masih terdapat beberapa kelemahan mendasar seperti adanya ketidak jelasan perencanaan kehutanan dan memperbesar kemungkinan terjadinya konversi lahan.⁸²

Kedua kebijakan tersebut memperparah kondisi kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Tanpa kedua kebijakan tersebut saja pengelolaan hutan di Indonesia sudah carut marut. Indonesia tercatat sebagai penyumbang gas rumah kaca (GRK) ketiga terbesar di dunia setelah AS dan China. Kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997 diperkirakan menyumbang 13-40% dari pelepasan emisi GRK dari bahan bakar fosil pada tahun 1997. Kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia masih belum bisa menjawab tantangan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam menghadapi ketidakpastian kondisi lingkungan akibat perubahan iklim, pemerintah harus mampu untuk membuat kebijakan yang adaptif. Sehingga dapat menjawab perubahan-perubahan ekstrim akibat dari perubahan iklim.

⁸² http://web.g-help.or.id/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=9&limit=10&limitstart=60 diakses pada tanggal 10/03/09

Selain pengerukan dan pembakaran bahan bakar fosil terus berlangsung, pengerukan batubara di pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan merupakan tempat pengerukan terbesar batubara Indonesia yang makin terpukul. Keadaan Listrik yang sering padam, lingkungan rusak berat, penduduknya tambah miskin dan kualitas kehidupan makin buruk. Batubara dari 2 propinsi ini lebih banyak dipakai oleh pihak asing, dibanding warganya.

Untuk itu sekretariat nasional JATAM bersama Civil Society Forum (CSF), Walhi Kalsel dan Jatam Kaltim mengkampanyekan isu perubahan iklim dengan tema HELP (Human Security, Ecological Debt, Land Right, Production and Consumption), tema ini memiliki kaitan perubahan iklim dengan penggerusan sumber daya alam yang ada di Kalimantan.⁸³ Bagaimana banjir, kerusakan hutan dan lahan merupakan suatu kesatuan yang membuat resiko perubahan iklim yang ada menjadi semakin rentan di Kalimantan.

B. Aktif Terlibat Dalam Pertemuan Lingkungan Hidup Internasional

Aktif terlibat dalam pertemuan lingkungan hidup internasional merupakan upaya WALHI untuk dapat menyalurkan pendapat tentang kondisi alam Indonesia yang semakin rusak dan perlu adanya upaya pelestarian dan perlindungan.

B.1. Mengikuti Pertemuan FWI dengan tema 'Laju dan Penyebab Deforestasi dan Degradasi hutan di Indonesia'

Forest Watch Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Global Forest Coalition dan Ikatan Cendekiawan Tanimbar Indonesia mengadakan pertemuan dengan tema 'Laju dan Penyebab Deforestasi dan

⁸³ *Kampanye HELP Keadilan Iklim!*, <http://help.jatam.org/?p=1> diakses pada tanggal 10/03/09

Degradasi hutan di Indonesia' pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2008. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai ornop lingkungan sedunia, Departemen Kehutanan, organisasi masyarakat adat, akademisi dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.⁸⁴

Ada beragam data yang menunjukkan rata-rata laju deforestasi di Indonesia dari tahun ke tahun. WALHI mengungkapkan bahwa laju deforestasi selama periode 1989 - 2003 adalah 1,9 juta hektar. Sementara Badan Planologi Departemen Kehutanan membagi dalam tiga periode yaitu, 1985 - 1997 sebesar 1,87 juta hektar, 1997 - 2000 sebesar 2,83 juta hektar dan 1,08 juta hektar pada periode tahun 2000 - 2005. FAO mencatat laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,87 juta hektar selama 2000 - 2005. Berapapun angka yang ditampilkan, menunjukkan bahwa laju deforestasi dan degradasi di Indonesia sangat tinggi dari waktu ke waktu.⁸⁵

Menurut WALHI tingginya permintaan pasar global akan komoditi berbasis sumber daya alam seperti: kayu, minyak sawit, pulp, tambang, dan kertas mendorong sikap reaktif dan oportunistis pemerintah untuk mengeluarkan banyak kebijakan sektoral yang semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan, eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Di sisi lain, perencanaan dan pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan oleh pemerintah tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang berarti. Misalnya sampai saat ini dari

⁸⁴ *Keakuratan, Ketersediaan Dan Keterbukaan Data Serta Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah*, <http://fwi.or.id/?p=106>, diakses pada tanggal 10/03/09

⁸⁵ http://www.walhi.or.id/hutan/HELP/shk/070524_HELP_cu/ diakses pada tanggal 22/11/08

120,35 juta hektar kawasan hutan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan baru sekitar 12% yang dikukuhkan atau di tata batas.⁸⁶

Deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan dampak lingkungan seperti: hilangnya keanekaragaman hayati, bencana alam, dan hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dalam konteks perubahan iklim global, kebakaran hutan dan lahan menjadikan Indonesia negara ke-3 penyumbang emisi CO₂ terbesar di dunia.

Pertemuan ini merumuskan bahwa akar masalah dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, antara lain:⁸⁷

- Lemahnya perencanaan tata ruang wilayah dan sinkronisasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan (pusat, daerah tingkat I dan daerah tingkat II) mengakibatkan inkonsistensi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan.
- Lemahnya akomodasi dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat.
- Lemahnya keakuratan, ketersediaan dan keterbukaan data dari para pihak yang memiliki kewenangan terhadap isu pengelolaan sumberdaya hutan.

B.2. Pertemuan Asia-Pacific Conference On Climate Change Di Bangkok

Berry Nahdian Forqan selaku direktur eksekutif nasional WALHI menyatakan “salah satu alasan mengapa pembicaraan REDD berjalan begitu cepat, hal ini dikarenakan ada sejumlah uang yang dijanjikan dari bisnis ini dan

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Keakuratan, Ketersediaan Dan Keterbukaan Data Serta Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah*, <http://fwi.or.id/?p=106>, diakses pada tanggal 10/03/09

bukan pada bagaimana mencegah deforestasi. REDD juga merupakan wujud penyederhanaan dan kedangkalan pikir, dimana hutan sebagai ekosistem yang sangat kompleks dan memiliki nilai penting bagi kehidupan umat manusia, hanya disempitkan sebagai sekadar transaksi ekonomis jual-beli karbon” ungkapnya tegas.⁸⁸

Dalam REDD yang menarik perhatian para negara pemilik hutan untuk terlibat dalam project REDD adalah karena ada harapan akan mendapat bagian dari dana bantuan untuk melaksanakan REDD. Tanpa mempedulikan akar masalah deforestasi yaitu, pemenuhan bahan baku murah seperti CPO, bubur kertas dan kayu olahan ke negara-negara industri yang paling bertanggungjawab atas bencana perubahan iklim.

Berbagai skema pendanaan tidak berkonsekuensi kepada keberlangsungan kehidupan serta kedaulatan sebuah negara atas sumberdaya alam, karena hampir keseluruhan inisiatif global adalah berbasis pasar yang dikendalikan oleh Bank Dunia dan korporasi besar. Uang yang didapat dari skema pasar tersebut akan dikonversi menjadi sertifikat mencemari bumi (carbon offsets) yang akan dibeli oleh negara-negara pencemar (Annex 1) dan perusahaan perusak lingkungan seperti Rio Tinto.⁸⁹

M. Teguh Surya yang merupakan kepala departemen advokasi eksekutif nasional WALHI menjelaskan, Sejalan dengan apa yang menjadi rekomendasi pada pertemuan Asia Pacifik Conference on Climate Change di Bangkok pada

⁸⁸ http://www.walhi.or.id/websites/index.php?view=article&catid=81%3Asiaranpers&id=97%3Amembedah-rencana-implementasi-dan-perdebatan-redd&format=pdf&option=com_content&Itemid=129 diakses pada tanggal 22/04/09

⁸⁹ http://issuu.com/koran_jakarta/docs/edisi_323_-_02_mei_2009, diakses pada tanggal 08/04/09

tanggal 23-24 Maret 2009 yang dihadiri oleh 13 Negara termasuk Indonesia (WALHI). Dimana forum tersebut merekomendasikan empat point penting. Pertama, skema pembiayaan REDD tidak dibenarkan berbasis pasar karena tidak berkelanjutan dan tidak menjawab akar persoalan deforestasi dan degradasi lahan. Kedua, carbon trading/ offsets tidak boleh menjadi bagian dari project REDD karena hanya akan memberikan izin kepada negara-negara maju (annex 1) untuk terus mencemari bumi dan pada akhirnya mereka tidak akan pernah menurunkan emisi domestik sebagai bentuk tanggungjawab perubahan iklim. Ketiga, mengingat masyarakat adat merupakan komunitas yang paling rentan terkena dampak dari perubahan iklim maka prinsip Free Prior Informed Concern harus menjadi bagian dalam setiap kebijakan perubahan iklim yang akan dihasilkan pada COP-15 di Copenhagen bulan Desember nantinya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Keempat, harus ada pengakuan hak masyarakat adat di dalam REDD sebagaimana yang diakui dalam UNDRIP (United Nation on The Rights of Indigenous Peoples).⁹⁰

Banyak lagi hal yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan sebelum pemerintah Indonesia benar-benar ingin menjalankan REDD. Diantaranya definisi hutan yang digunakan masih mengarah pada kepentingan bisnis dan tidak mengakui adanya hutan adat, penentuan baseline data yang tepat, model pembagian keuntungan yang masih jauh dari nilai keadilan ekonomi berbasis komunitas, korupsi disektor kehutanan, inkonsistensi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan, model pengawasan yang tidak melibatkan partisipasi

⁹⁰ http://www.walhi.or.id/websites/index.php?view=article&catid=81%3Asiaranpers&id=97%3Amembedah-rencana-implementasi-dan-perdebatan-redd&format=pdf&option=com_content&Itemid=129 diakses pada tanggal 22/04/09

masyarakat (pemindahan kegiatan deforestasi dari kawasan yang ikut skema REDD ke kawasan yang tidak terlibat dalam skema REDD).

Jalan keluar terbaik tanpa resiko yang bisa diambil pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan apresiasi dan pengakuan atas inisiatif masyarakat adat yang telah menyelamatkan kawasan hutan dari proses penghancuran. Seperti yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat untuk Penyelamatan Gambut (ARPAG), yang tanpa REDD sudah berhasil melakukan rehabilitasi lahan dan hutan adatnya secara swadaya.⁹¹Dimana masyarakat di Desa Mahajandau, Sei Jaya, Bakuta, Pulau Kaladan, Mantangai, Sei Ahas, Katunjung, Tarantang, Dusun Talekung Punei, telah melakukan penanaman pohon karet seluas 1.640 ha, rotan seluas 5.525 ha, membangun persawahan seluas 3.430 ha, kebun purun seluas 481 ha, rehabilitasi hutan dengan berbagai jenis pohon lokal seperti pohon pantung, muhur, blangiran, sungkai, dan lain sebagainya seluas ± 1.758 ha serta membuat dan memulihkan kembali ribuan beje-beje yang telah hilang dan rusak. Inisiatif ini lebih baik dan minim resiko dibandingkan dengan REDD yang mengancam hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan, beje, sungai, handil dan tatah yang akan dihilangkan

B.3. Koalisi LSM Lingkungan Hidup Se-Asia Dalam Pertemuan WOC

Inisiatif Pemerintah Indonesia menyelenggarakan WOC (World Ocean Conference) pada tanggal 11-15 Mei 2009 di Manado, Sulawesi Utara, terkesan melindungi kepentingan negara-negara dan lembaga donor. Persoalan pokok lautan yang menjadi muara sedimentasi dan limbah industri, memberi keleluasaan

⁹¹ *Ibid.*

bagi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, meluasnya degradasi ekosistem pesisir akibat industrialisasi pertambakan udang dan reklamasi pantai, serta dampak perubahan iklim yang kian terasa, terpinggir oleh hasrat ekonomis sesaat.

Dengan adanya WOC ini maka organisasi-organisasi lingkungan hidup sedunia membentuk Aliansi Manado. Aliansi ini terdiri dari WALHI/FoE, JATAM, KIARA, Perkumpulan KELOLA, YSN, AMMALTA, Institut Hijau Indonesia, KPNNI, SINAR, PKP2M, SEAFish, COMMIT, KAU, ICSF.⁹²

Maraknya kejahatan perikanan ini akan berdampak pada ketidakberlanjutan sumber daya ikan. Bahkan, bisa berujung pada krisis. Agenda itu tak menagih tanggung jawab negara-negara dan lembaga-lembaga finansial yang terlibat dalam aktivitas memporak-porandakan laut Indonesia. Dapat dipastikan, upaya mengoptimalkan peran laut dalam menangani masalah perubahan iklim, yang menjadi tema utama WOC mustahil dapat terwujud

Keraguan WALHI akan penyelenggaraan WOC mampu menyelesaikan substansi persoalan kelautan dunia dan CTI meminta pemerintahan Indonesia menempuh diplomasi dalam WOC dengan membahas sebagai berikut:⁹³ (1) mengungkap akar persoalan kelautan nasional dan global dengan berlandas pada asas keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional; (2) mengajak tindakan kolektif masyarakat dunia untuk memberikan sanksi kolektif kepada aktor penyebab krisis laut dan iklim dengan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan di depan hukum; dan (3) membangun kesadaran kolektif

⁹² *Lentera di Atas Bukit*, <http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/05/forum-internasional-kelautan-dan.html>, diakses pada tanggal 13/03/09

⁹³ <http://www.walhi.or.id/websites/index.php/in/regional/sumatera/walhi-sumatera-selatan/111-kampanye-walhi-sumsel/153-pernyataan-sikap-walhi-diplo-ind> diakses pada tanggal 13/03/09

guna memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak masyarakat nelayan tradisional.

“Salah satu masalah mendasar kelautan yang tak dibicarakan adalah komersialisasi kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi laut telah mengerutkan wilayah kelola nelayan dan melahirkan konflik di banyak tempat. Penambahan kawasan konservasi masal yang mengejar kuantitas bukan jawabannya”, ujar Berry Nahdian Furqon, direktur eksekutif nasional WALHI.⁹⁴

Bersamaan dengan penyelenggaraan WOC, Aliansi Manado (KELOLA, WALHI Sulawesi Utara, Yayasan Suara Nurani, AMMALTA, SINAR, KIARA, WALHI, JATAM, KPNNI, PK2PM, SEAFish, ICSF) menggelar Forum Internasional Kelautan dan Keadilan Perikanan (FKKP) atau (International Forum for Marine and Fisheries Justice. Forum ini bertajuk “Cegah Memburuknya Perubahan Iklim, Selamatkan Nelayan Tradisional”. Forum internasional ini melibatkan kelompok adat, nelayan tradisional, LSM, akademisi, dan masyarakat luas yang menaruh peduli atas pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya yang terkandung didalamnya.⁹⁵

FKKP menyelenggarakan beberapa kegiatan sejak tanggal 9 hingga 17 Mei 2009 dengan tujuan menyampaikan pesan alternatif selain dari WOC. Bentuk kegiatan yang direncanakan diantaranya workshop, seminar, acara publik, pameran budaya seperti kerajinan nelayan hasil laut, acara ini dari murni perspektif nelayan tradisional. Salah satu kegiatan yang juga tengah dipersiapkan

⁹⁴<http://www.walhi.or.id/websites/index.php/in/regional/sumatera/walhi-sumatera-selatan/111-kampanye-walhi-sumsel/153-pernyataan-sikap-walhi-diplo-ind> diakses pada tanggal 13/03/09

⁹⁵<http://www.jakartapress.com/news/id/6433/Demo-WOC-Direktur-WALHI-Ditangkap-Langsung-Diadili.jp>, diakses pada tanggal 13/03/09

oleh FKPP adalah Kongres Nelayan Nasional Indonesia yang akan diikuti oleh 20 negara.

Aliansi Manado juga menggelar aksi (bersama perwakilan Nelayan dari 17 propinsi dan 4 negara di Asia Tenggara-Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia) di pantai Malalayang-depan Kolongan Beach Hotel. Untuk menyampaikan solidaritas kepada nelayan-nelayan Sulawesi Utara yang datang dengan 21 kapal dari berbagai wilayah. Dengan bergantian membacakan dan membuka Deklarasi Manado. Selain itu mendesak forum WOC-CTI menyikapi praktek illegal fishing dan pencemaran laut yang kerap dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tambang. Aliansi Manado juga menuntut negara dan masyarakat dunia segera memenuhi hak-hak nelayan tradisional. Namun dibubarkan paksa oleh aparat Kepolisian Polwilatabes Manado dan menangkap aktivis Aliansi Manado yaitu Berry Nahdian Forqan (Direktur Eksekutif Nasional WALHI) dan Erwin Usman (Kepala Departemen Penguatan Regional WALHI)⁹⁶

Meski demikian, aktivis dari Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia melakukan demo dengan mendesak forum WOC menyikapi praktek illegal fishing dan pencemaran laut yang kerap dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tambang. Mereka juga menuntut negara dan masyarakat dunia segera memenuhi hak-hak nelayan tradisional.

⁹⁶ <http://www.antara.co.id/arc/2009/5/11/lsm-protas-apat-intimidasi-nelayan-jelang-woc/>, diakses pada tanggal 13/03/09

BAB V

KESIMPULAN

Perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global akan meningkatkan berbagai macam penyakit terhadap manusia juga akan berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan karena terganggu. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak negatif pada kehidupan di daerah pesisir pantai. Karena gelombang pasang dan banjir yang sering terjadi, hujan lebat, badai, kekeringan yang silih berganti, sulitnya ketersediaan air bersih, serta penyebaran berbagai penyakit. Apabila air laut naik secara perlahan ke darat setinggi 1 meter saja maka kota-kota yang terletak di pesisir pantai akan tenggelam. Kota tersebut misalnya Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Manado. Gangguan atau terputusnya 'urat nadi' tersebut akan mengganggu kondisi ekonomi, social, pertahanan dan keamanan, pemerintahan dan lain-lain.

Konferensi Perubahan Iklim yang diadakan di Bali pada tanggal 3-15 Desember 2007 dengan membahas dampak pemanasan global menjadi harapan WALHI dalam upayanya menangani efek perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

Kekecewaan WALHI terhadap pemerintah Indonesia sebagai negara berkembang yang seharusnya mengurangi emisi dengan mengatasi deforestasi di Indonesia tetapi bertindak sebaliknya. Dengan membuat kebijakan yang lebih menitik beratkan segi ekonomis daripada pelestarian hutan. Seperti halnya, konversi hutan untuk lahan sawit, konversi hutan bakau untuk pertambangan, izin

pembukaan hutan lindung untuk pertambangan. Kegiatan tersebut makin memperparah keadaan kawasan hutan.

Oleh karena itu, WALHI pun tidak tinggal diam, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim yang makin lama berdampak makin ekstrem sebagai langkah menuju Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen, Denmark dengan mengkampanyekan pelestarian alam dan aktif terlibat dalam pertemuan lingkungan hidup internasional.

Dalam kampanye pelestarian alam dimana WALHI mengajak masyarakat untuk mendukung Donasi Selamatkan 11,4 Juta Hektar Hutan Indonesia yang merupakan langkah penyelamatan hutan atas penyalahgunaan kawasan hutan dengan dikeluarkannya PP No. 2/2008 dan ikut serta mengkampanyekan Keadilan Iklim dengan tema HELP - Human Security, Ecological Debt, Land Right, Production and Consumption, tema yang memiliki kaitan perubahan iklim dengan penggerusan sumber daya alam di berbagai pulau di Indonesia.

Selain itu keterlibatan WALHI dalam mengikuti pertemuan-pertemuan berskala internasional dengan memperjuangkan pelestarian alam. Seperti dengan mengikuti Pertemuan FWI dengan tema 'Laju dan Penyebab Deforestasi dan Degradasi hutan di Indonesia' pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2008 merumuskan akar masalah dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, Lalu ikut serta dalam Pertemuan Asia Pasifik Conference On Climate Change Di Bangkok yang meminta kewajiban negara-negara maju untuk menurunkan emisi karbon. Selain itu dalam koalisi LSM lingkungan hidup se-Asia, WALHI mengikuti penyelenggaraan WOC (World Ocean Conference) pada tanggal 11-15 Mei di

Manado, Sulawesi Utara, dengan memperjuangkan akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya yang terkandung didalamnya dan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Teks

- Almond, Gabriel A. and G.B. Powell Jr., *Comparative politics : A Developmental Approach*, Little, Brown and Company, 1968; Fourth Indian Reprint, 1978.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Diposaptono, Subandono, Budiman dan Firdaus A., *Menyiasati Perubahan Iklim Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, Penerbit Buku Ilmiah Populer, Bogor, 2009.
- Dougherty, James E., and Robert L. Pfaltzgraf, Jr, *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey*, Third Edition, Harper Collins Publisher, New York, 1990.
- Hall, John A, *Civil Society: Theory History Comparison*, Polity Press London, 1995.
- Harichayono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Tiara Wacana dan YP2LPM, 1986.
- Harman, Christ, *Globalisasi dan perlawanan*, disadur dan diterjemahkan oleh Julian dan Setiabudi dari Anti Capitalisme Theory and Practice, International Socialisme No. 88, London, 2000
- Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Kartodiharjo, Hariadi, *Dibalik Kerusakan Hutan & Bencana Alam Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2008
- Kolb, Eugene J., *A Framework for Political Analysis*, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1978.
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Noeradi, Wicaksono, *Revolusi Berhenti di Hari Minggu*, Gramedia, 1999.
- Rusbiantoro, Dadang, *Global Warming For Beginner-Pengantar Komprehensif Tentang Pemanasan Global*, O₂, Yogyakarta, 2008.

Susanta, Gatut dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, Penebarplus+, Jakarta, 2007.

Thoha, Miftah, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Citra Niaga Rajawali Pers, Jakarta 1993.

Internet

CSF_for_Climate_Justice:Perihal, <http://wiki.csoforum.net/index.php?title=Wiki> di akses tanggal 20 Juni 2008

IDRC 2000, http://www.idrc.ca/en/ev-30610-201-1-DO_TOPIC.html diakses pada tanggal 22 November 2008

Jeda Tebang Sekarang, Usulan Proses Pelaksanaan Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Penyelamatan Hutan Tropis Tersisa, http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070528_jdtbgskrg_li/ diakses pada tgl 08 Oktober 2008

Jeda Tebang: Solusi dari Bencana Ekologis, http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/moratoriumlogging_220407/ diakses pada tanggal 06 November 2008

Kampanye HELP Keadilan Iklim!, <http://help.jatam.org/?p=1> diakses pada tanggal 10 Mei 2009

Keadilan Iklim versus Penjajahan Baru, http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/080225_keadilan_iklim_cu/ diakses tanggal 28 Januari 2008.

Keakuratan, Ketersediaan Dan Keterbukaan Data Serta Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah, <http://fwi.or.id/?p=106>, diakses pada tanggal 10 Mei 2009

Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007, http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Perubahan_Iklim_PBB_2007 di download tanggal 28 Januari 2008.

Lentera di Atas Bukit, <http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/05/forum-internasional-kelautan-dan.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2009

Oleh-oleh dari Bali: Skema REDD dan Climate Justice,
<http://portalhi.web.id/?p=70> diakses tanggal 22 Juni 2008

Pemanasan Global, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global diakses
tanggal 15 Februari 2008

http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/061227_kjhtn_alam_cu/ diakses pada
tanggal 06 September 2008

http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/070528_benc_eko_htn_cu/ diakses
pada tanggal 01 November 2008

http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/070724_prbhn_iklim_cu/ diakses
pada tanggal 12 Oktober 2008

http://www.walhi.or.id/hutan/HELP/shk/070524_HELP_cu/ diakses pada tanggal
22 November 2008

[http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_PBB_untuk_Perubahan_](http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_PBB_untuk_Perubahan_Iklim)
[Iklim](http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_PBB_untuk_Perubahan_Iklim) diakses pada tanggal 01 November 2008

<http://www.emawitoelar.co.id> diakses tanggal 27 November 2008

[http://www.walhi.or.id/ ttgkami/profil_wlh/](http://www.walhi.or.id/ttgkami/profil_wlh/) diakses pada tanggal 23 November
2008

http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/hutan/080210_save_our_borneo_und/,
diakses pada tgl 27 Oktober 2008

http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konversi/080216_htn_lindung_sp,
diakses pada tgl 03 Maret 2008

<http://www.cixers.co.cc/2008/03/dukung-donasi-selamatkan-114-juta.html>,
diakses pada tgl 03 Maret 2008

[http://www.walhi.or.id/kampanye/future-
actions-on-climate-change/stos/](http://www.walhi.or.id/kampanye/future-actions-on-climate-change/stos/), diakses pada tgl 22 Oktober 2008

[http://www.walhi.or.id/ kampanye/energi/climate_250407/](http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/climate_250407/) diakses tanggal 29
Desember 2008

http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/070528_htn_indo_cu/ di akses pada
tanggal 01 November 2008

http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070328_jdtbng_htnaceh_ps/ diakses
pada tanggal 06 November 2008

http://nsidc.org/news/press/20080325_Wilkins.html diakses tanggal 27 Agustus 2008

http://en.wikipedia.org/wiki/2003_European_heat_wave diakses tanggal 28 November 2008

<http://satudunia.oneworld.net/?q=node/2256> diakses pada tanggal 22 Desember 2008

<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2999354,00.html> diakses pada tanggal 25 November 2008

<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2988318,00.html> diakses pada tanggal 25 November 2008

http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Kementrian_Lingkungan_Hidup_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 24 Oktober 2008

<http://www.planetark.com/>, diakses pada tanggal 02 September 2008

http://web.g-help.or.id/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=9&limit=10&limitstart=60 diakses pada tanggal 10 Mei 2009

<http://www.walhi.or.id/websites/index.php/in/regional/sumatera/walhi-sumatera-selatan/111-kampanye-walhi-sumsel/153-pernyataan-sikap-walhi-diplo-ind> diakses pada tanggal 13 Mei 2009

<http://www.jakartapress.com/news/id/6433/Demo-WOC-Direktur-WALHI-Ditangkap-Langsung-Diadili.jp>, diakses pada tanggal 13 Mei 2009

<http://www.walhi.or.id/websites/index.php/in/regional/sumatera/walhi-sumatera-selatan/111-kampanye-walhi-sumsel/153-pernyataan-sikap-walhi-sumsel-dan-kp-shi-sumsel-terhadap-represif-aparat-polisi-di-woc-manado>, diakses pada tanggal 13 Mei 2009

Majalah Dan Surat Kabar

Ann Jr, Goei Tiong, *Ironi PP Nomor 2/2008*, Jawa Pos, 6 Maret 2008.

Maaf Bencana Masih Mengancam, Kompas, 2 Desember 2008

Majalah Tanah Air. Edisi No. 1/ November 1980.

Majalah Tanah Air. Oktober 1984. No. 43 Tahun IV.

Pulihkan Bumi, Selamatkan Kehidupan, Kompas, 3 Desember 2007.

Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi : Konvensi Perubahan Iklim, Kompas,
2003.

Silaban, Ir Bridon, *PP No 2 Tahun 2008 dan Obral Hutan Lindung*, Medan
Bisnis, 17 Maret 2008.

Suara Pembaharuan, 17 Juni 2007

LAMPIRAN